

SEPTEMBER 2023

LAPORAN PENELITIAN LAPANGAN

KEBOHONGAN HIJAU:

Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara



Dipublikasikan bersama oleh:

NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur



Laporan Penelitian Lapangan

KEBOHONGAN HIJAU:

Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki
dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak
Proyek Kawasan Industri Hijau
di Kalimantan Utara

Dipublikasikan bersama oleh:

**NUGAL Institute for Social and
Ecological Studies** dan
**Jaringan Advokasi Tambang
(JATAM) Kalimantan Timur**



SEPTEMBER 2023

LAPORAN PENELITIAN LAPANGAN

KEBOHONGAN HIJAU

Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan
Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek
Kawasan Industri Hijau
di Kalimantan Utara

Dipublikasikan bersama oleh:

NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur



SEPTEMBER 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
LATAR BELAKANG	5
TEMUAN PERMULAAN	9
a. Revisi RTRW Berulang-ulang Seharga “5 Miliar”	10
b. Pemutihan Kawasan Berfungsi Penting?	11
PROFIL <i>TENANT</i> DAN KAWASAN INDUSTRI	15
a. Industri Petrokimia (<i>Petrochemical Industry</i>)	18
b. Industri Baja (<i>Steel Industry</i>)	18
c. Industri Manufaktur <i>Polycrystalline</i> (Panel Surya) dan Industri Alumunium (Material Mobil Listrik)	18
BOX I: Masih Rakus Batu Bara dan Air	20
OLIGARKI DIBALIK KEDOK INDUSTRI HIJAU	23
BOX II: Luhut, Thohir & Juanda Lesmana Berjumpa Dalam Satu Belanga	31
YANG HILANG & YANG RUSAK; TEMUAN LAPANG DAYA RUSAK DAN ANCAMAN KESELAMATAN DI TANAH KUNING HINGGA KAMPUNG BARU	35
a. Potret Status Keselamatan Air, Pangan dan Energi Warga Setempat	39
b. Potret Keselamatan Pangan	42
c. Nelayan Yang Dipaksa Berpisah dari Lautan	43
d. Lenyapnya Pekerjaan Perempuan Nelayan	48
e. Perempuan Tidak Diajak Bicara, “Kami Cuma Bisa Bergosip”	51
f. Mulai Kehilangan Anggota Nelayan	53
g. Bagan Melimpah Teri Tinggal Kenangan	54
h. Gusar Para Pembuat Kapal	56

i. Memasok Hingga ke Tawau dan Tiongkok	59
j. Ekonomi Sarang Walet Terancam Hilang Melayang	61
k. Merica Tinggal Cerita	63
l. Lenyapnya Identitas dan Sejarah	67
m. Pesta Pantai, <i>Mappanretasi</i> Masih Berlanjut?	69
n. Ekonomi Wisata dan Kuliner Lokal Tinggal Sejengkal	70
BOX III: Kisah Tiga Pejuang, Warga & Buruh Melawan Kriminalisasi	71
BOX IV: "Mereka Menggusur Kami" Berbagai Modus Perampasan Tanah	77
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	81
SUMBER BAHAN BACAAN DAN PUSTAKA	87
TENTANG PENYUSUN	92

DAFTAR SINGKATAN

ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
JETP	: <i>Justice Energy Transition Partnership</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
PERDA	: Peraturan Daerah
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
KAI	: Kalimantan Aluminium Industri
CMI	: Cita Mineral Investindo
KHN	: Kayan Hydropower Nusantara
MW	: Mega Watt
BRI	: <i>Belt and Road Initiatives</i>
G-20	: <i>Government</i> Dua Puluh
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
KKP	: Kawasan Konservasi Perairan
RUPTL	: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
GW	: Giga Watt
GIS	: <i>Geographic Information System</i>
KIPI	: Kalimantan Industrial Park Indonesia
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PERPRES	: Peraturan Presiden
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
KIHI	: Kawasan Industri Hijau Indonesia
KPU	: Kawasan Pemanfaatan Umum

RZWP3K	: Renzana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
SKKL	: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan
IPAL	: Instalasi Pengelolaan Air Limbah
HGU	: Hak Guna Usaha
BCAP	: Bulungan Citra Agro Persada
ISI	: Indonesia Strategis Industri
KPP	: Kayan Patria Propertindo
AHU	: Administrasi Hukum Umum
ADMR	: Adaro Minerals Indonesia
GEB	: General Energy Bali
KHE	: Kayan Hydro Energi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
KHN	: Kayan Hydropower Nusantara
FMG	: Fortescue Metals Group
KK	: Kepala Keluarga
RT	: Rukun Tetangga
RPJPD	: Rencana Jangka Panjang Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KIKI	: Kawasan Industri Kalimantan Indonesia
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
KBRI	: Kantor Berita Republik Indonesia

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di balik gemerlap promosi megaprojek kawasan industri terbesar di dunia yang diklaim sebagai kawasan industri hijau, wahana bagi berbagai industri dan manufaktur yang menghasilkan produk dan teknologi, untuk menopang ambisi pemerintah Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau dan demi mengejar target transisi energi atas nama perubahan iklim. Yang juga akan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air yang juga dilabeli sebagai sumber energi terbarukan di Kalimantan Utara ini, ternyata terdapat pemalsuan dan penggelapan cerita dan duduk perkara.

Pemalsuan dan penggelapan cerita dan duduk perkara tersebut mulai dari ancaman daya rusak, ekonomi menyejarah rakyat yang akan hilang, digantikan paksa oleh operasi kuasa oligarki politik dan bisnis hingga bermacam rupa modus keji perampasan tanah-laut dan pengusuran ruang hidup yang disembunyikan yang tak diketahui oleh publik luas.

Pengurus negara mengklaim seluruh aktivitas industri dan *tenant* di kawasan ini akan menerapkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi secara drastis jejak karbon melalui penerapan teknologi hijau, produk hijau dengan standar tertinggi dalam lingkungan hidup bahkan mengklaim dipasok oleh sumber energi terbarukan, oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang disebut sejalan

dengan target transisi energi dan *net zero emission* untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah Indonesia pada 2060 nanti.

Namun, dari penelusuran dalam laporan ini hal yang akan terjadi adalah sebaliknya. Penggelapan dan pemalsuan dari keseluruhan jalan cerita industri ini bahkan terpampang, bukan hanya rakus lahan atau membutuhkan lahan dengan skala besar namun juga rakus air dan rakus energi. Jumlah air yang dipakai dan air limbah yang ditinggalkan amat banyak termasuk mengenai urusan pemenuhan pasokan energi. Industri ini akan tetap bersumber dari PLTU batu bara, tidak seperti klaim sebelumnya yang menjual label hijau karena hanya akan menggunakan energi non fosil seperti PLTA.

Komitmen pasca pertemuan G-20 lalu pun terasa hipokrit, karena pemerintah Indonesia yang mendapatkan kucuran dana sekitar 610 juta USD. Dari skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan *Energy Transition Mechanism* dari *Asian Development Bank* (ADB) tentang penghentian pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara baru. Akan tetapi di saat yang sama pemerintah Indonesia masih menoleransi dan memberikan pengecualian bagi proyek PLTU batu bara yang ada di dalam kawasan industri melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 seperti juga rencana pembangunan PLTU untuk kebutuhan jangka pendek di Bulungan dan kawasan industri ini.

Dalam laporan ini terungkap total energi listrik yang akan digunakan sebesar 11.404 GWh tiap tahunnya yang kembali bersandar pada batu bara, hanya dari industri petrokimia dan baja. Jika ditotal terdapat kebutuhan 27.620.000 ton batu bara tiap tahunnya. Jumlah 27,6 juta ton batu bara yang hanya digunakan di kawasan industri ini setara dengan produksi batu bara dari sebanyak 37 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Utara saat ini.

Sementara untuk pemenuhan air bersih dan air baku, kawasan industri ini akan merampas air dari Sungai Pindada dan Sungai Mangkupadi Tawar yang dikapling berada dalam kawasan mereka hingga Sungai Kayan Bulungan. Keseluruhan dari data kebutuhan air kawasan industri ini akan menghabiskan 39.450.560 kubik tiap tahunnya, jumlah itu setara dengan pemakaian 1 ½ tahun pemakaian sekitar 700 ribu penduduk Kalimantan Utara. Bahkan diperkirakan setiap harinya akan terdapat 286.439,86 air limbah yang tetap berujung dibuang setiap empat jam dalam sehari ke sejumlah badan air setempat warga yaitu Sungai Mangkupadi Asin, Sungai Pindada, Mangkupadi Tawar, Kalaputan Besar dan Sungai Kampung Baru.

Laporan ini menemukan bagaimana kuasa operasi politik, hukum dan bisnis berlangsung untuk memuluskan megaprojek ambisius ini. Melalui serangkaian operasi politik dan hukum di daerah untuk mengubah berbagai status kawasan

penting melalui rencana ketiga kalinya revisi terhadap tata ruang. Mulai dari revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan 2012–2032 yang akhirnya diubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW 2021–2041 dan munculnya kembali rencana revisi ketiga untuk mengakomodir rencana perluasan berikutnya.

Laporan ini menemukan kawasan perikanan drastis menyusut mengalami penciutan hingga 5 kali lipat, kawasan wisata pantai yang diantaranya juga berada di Tanjung Palas Timur ikut menyusut 17 kali lipat dari semula, tumpang tindih kawasan budidaya air payau, kawasan pertanian, kawasan peruntukan lahan pangan, pertanian berkelanjutan bahkan hingga kawasan pemukiman pedesaan seperti yang dialami oleh Kampung Baru di Desa Mangkupadi yang sedang menghitung hari untuk digusur paksa.

Terungkap pula delapan modus lainnya dalam memuluskan perampasan tanah dan ruang hidup warga. Mulai dari perubahan nilai jual objek pajak secara signifikan dari Rp50.000 menjadi hanya Rp6.000, berbagai surat edaran penetapan harga bangunan, tanah dan tanam tumbuh sepihak, penciptaan juru *lobby* di tingkat kampung, pembengkakkan luasan dalam proses jual beli tanah hingga kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga pemilik tanah di Kampung Baru, Mangkupadi.

Laporan ini juga memaparkan ancaman daya rusak melalui pendekatan membaca dan memahami metabolisme sosial dan ekologis. Terdapat 12 aspek yang akan hilang dan rusak disepanjang bentang sabuk pesisir Tanah Kuning hingga Kampung Baru, Mangkupadi. Mulai dari nasib para nelayan yang diceraikan paksa dari lautan, lenyapnya pekerjaan perempuan nelayan, kisah perempuan yang tidak diajak bicara, kelompok-kelompok nelayan yang mulai kehilangan anggotanya, kesaksian mengenai bagan-bagan yang melimpah ikan teri namun akan tinggal jadi kenangan, kegusaran para pembuat kapal tradisional, keunggulan ekonomi perikanan yang selama ini memasok hingga ke Tawau dan Tiongkok, ekonomi sarang walet yang terancam hilang melayang, merica tinggal cerita di Mangkupadi, lenyapnya identitas dan sejarah, kegelisahan yang menyeruak tentang Pesta Pantai, *Mappanretasi* yang masihkah bermakna saat industri hadir nanti, hingga ancaman atas ekonomi wisata dan kuliner lokal yang kini menunggu takdirnya sejengkal lagi.

Celaknya bersamaan dengan operasi penguasaan lahan skala besar, perampasan air, pencemaran air hingga batu bara yang tetap dibakar melalui PLTU Captive di Tanah Kuning-Mangkupadi, berlangsung pula ancaman pada ruang hidup lain yang ikut dikorbankan untuk pembangunan proyek PLTA Kayan. Proyek bendungan seluas 184.270 hektare ini menyebut selain untuk melistriki ibu kota baru di Kalimantan Timur juga akan dibangun untuk menyuplai kebutuhan listrik Kawasan Industri

Hijau Indonesia, Tanah Kuning-Mangkupadi Kalimantan Utara. Proyek ini akan menenggelamkan enam kampung diantaranya Desa Long Lejuh, Desa Long Peso, Long Bia, Long Peleban, situs purbakala, makam keramat dan kehidupan orang-orang asli masyarakat Dayak di Desa Muara Pangiang dan Long Lian juga ikut terancam.

Dari seluruh operasi pemicu derita rakyat itu, terdapat sekelompok pelaku politik dan bisnis yang justru mendapatkan untung besar. Laporan ini menelusuri oligarki politik bisnis dibalik puluhan data dan profil perusahaan yang berada dalam Kawasan Industri Hijau Indonesia ini, mulai dari pengelola, pemilik *tenant* hingga perusahaan pemasok energi dan bahan bakunya yang diduga memiliki konflik kepentingan.

Sejumlah nama-nama mentereng terungkap seperti Garibaldi Thohir, yang akan menerima manfaat paling besar karena, 90 persen dari keseluruhan lahan Kawasan Industri Hijau ini adalah konsesi perkebunan sawit milik adik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Orang dekat Luhut seperti Justarina Sinta Marisi Naiborhu, lalu munculnya nama lainnya seperti oligarki lokal di Kaltara, Lauw Juanda Lesmana hingga munculnya nama mantan Walikota Surakarta/Solo dan sekaligus mantan pasangan Walikota Joko Widodo sebelum mencalonkan sebagai Presiden pada periode 2010-2012 yakni FX. Hadi Rudyatmo. Ketua DPC Kota Solo dan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini muncul namanya di dalam dokumen salah satu perusahaan *tenant* di kawasan industri.

Termasuk perkongsian PT Kalimantan Alumunium Industri (KAI) yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Indo Alumunium dan PT Cita Mineral Investindo (CMI). Cita Mineral Investindo adalah *emiten* pertambangan bauksit yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Harita Jayaraya (Harita Group) sebesar 60,64%. Harita Jayaraya adalah perusahaan milik Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, berusia 94 tahun, orang terkaya ke-20 di Indonesia menurut Forbes. Harita Group adalah penyebab utama dibalik daftar derita warga di Pulau Obi, Maluku Utara dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Dua pulau kecil ini tengah diluluhlantakkan oleh operasi tambang dan pabrik *smelter* nikel mereka.

Pada akhirnya laporan ini juga menyajikan tawaran rekomendasi untuk diambil sebagai bagian dari upaya melakukan investigasi-advokasi lanjutan dan rangkaian melawan-memulihkan bersama-sama, mengingat kepentingan yang makin mendesak yang dihadapi oleh warga di garis depan.

Tim Penyusun

2

LATAR BELAKANG

Pada akhir Desember 2021 lalu, Presiden Jokowi melakukan *groundbreaking* pembangunan kawasan industri yang diberi “label” sebagai Kawasan Industri Hijau di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara¹. Jokowi mengklaim bahwa kawasan industri seluas 16.400 hektare dan akan bertambah lagi luasnya hingga 30 ribu hektare ini adalah kawasan industri terbesar, bukan hanya asia tapi terbesar di dunia. *Tenant-tenant* di kawasan industri ini diproyeksikan akan memproduksi hilirisasi mineral dan logam, mulai pabrik dan *smelter* untuk aluminium, *polysilicon*, *steel*, *lithium-ion battery* hingga *petrochemicals*². Menteri Koordinator Investasi, Luhut Pandjaitan menyebut, kawasan industri itu memerlukan investasi sebesar US\$132 miliar, atau setara dengan Rp1.848 triliun. Ia pun memastikan bahwa pendanaan proyek sepenuhnya diberikan oleh swasta tanpa adanya garansi dari pemerintah³.

¹ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-groundbreaking-kawasan-industri-hijau-di-kaltara/>, diakses pada 29 November 2022.

² <https://kaltara.tribunnews.com/2021/12/21/ketua-konsorsium-perusahaan-indonesia-dalam-kipi-beber-produk-kawasan-industri-hijau-di-kaltara?page=2>.

³ <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/kipi-tana-kuning-mangkupadi-disebut-kawasan-industri-terbesar-di-dunia/>.

Kawasan industri ini dianggap memiliki letak yang strategis karena berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional di *Pacific Rim*, dimana 70 persen perdagangan dunia berada⁴. Bukan hanya karena luas arealnya yang juga diglorifikasi, namun juga label industri hijau-nya. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan mengumbar bahwa daya tarik kawasan industri ini terletak dari sumber listriknya yang akan berasal dari pembangkit energi terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, di Kalimantan Utara. PLTA ini diklaim sebagai energi “bersih” dan “hijau”. Hal ini menurut Moeldoko akan menarik kalangan investor dan industri yang peduli pengurangan emisi karbon, sekaligus sejalan dengan target transisi energi dan *net zero emission* Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah Indonesia pada 2060⁵.

Setidaknya terdapat dua PLTA yang bersaing membangun dan memasok listrik ke kawasan industri ini, yakni PLTA Mentarang yang dikelola oleh Kayan Hydropower Nusantara (KHN) yang merupakan perusahaan gabungan Kayan Patria Pratama Group dan Sarawak Energy dari Malaysia, dengan total kapasitasnya 1.375 megawatt (MW). Sementara PLTA Kayan yang dikelola yang Indonesia Strategis Industry (ISI) melalui PT Kayan Hydro Energy (KHE) berasal dari bendungan mereka yang direncanakan “menambang air” di Sungai Kayan dan memasok 9.000 MW juga ke kawasan industri tersebut.

Namun, disisi yang lain proyek ini makin hipokrit, karena pasca pertemuan G-20 lalu pemerintah Indonesia mendapatkan kucuran dana sekitar 610 juta USD. Masing-masing dari skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan *Energy Transition Mechanism* dari *Asian Development Bank* (ADB) yang mengatur penghentian pembangunan proyek pembangkit batu bara (PLTU) baru⁶. Akan tetapi disaat yang sama pemerintah Indonesia masih menoleransi dan memberikan pengecualian bagi proyek PLTU batu bara yang ada di dalam kawasan industri melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022⁷. Begitu juga rencana pembangunan PLTU untuk kebutuhan jangka pendek di Bulungan dan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning ini⁸.

4 <https://kemenperin.go.id/artikel/17245/Kawasan-Industri-Tanah-Kuning-Diusulkan-Masuk-Proyek-Strategis-Nasional>, diakses pada 29 November 2022.

5 <https://nasional.kontan.co.id/news/plta-kayan-cascade-akan-mulai-groundbreaking-bulan-depan>, diakses pada 29 November 2022.

6 <https://infotambang.id/dapat-dana-transisi-energi-di-ktg20-bali-indonesia-diminta-prioritaskan-ebt/>, diakses pada 15 Desember 2022.

7 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/225308/perpres-no-112-tahun-2022>, diakses pada 15 Desember 2022.

8 <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/peluang-investasi/detail/?id=949>, diakses pada 15 Desember 2022.

Khusus mengenai konfigurasi investor untuk proyek kawasan industri dan energi ini pada pertemuan G-20 lalu dalam statemen bersamanya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok menyatakan makin yakin untuk terlibat dalam proyek kawasan industri ini. Hal ini karena sejalan dengan proyek *Belt and Road Initiatives (BRI)*-mereka⁹. Selain Tiongkok, Jokowi juga pernah menyebut Uni Emirat Arab hingga yang terbaru penandatanganan *principal agreement* untuk proyek PLTA oleh Sumitomo dari Jepang di sela-sela pertemuan G-20 lalu di Bali¹⁰. Selain investor-investor itu, dalam beberapa pertemuan sebelumnya juga pernah muncul nama Fortescue Metal Group milik taipan Australia, terutama setelah perbincangan Andrew Forrest pemilik group ini dengan Menteri Koordinator Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di penghujung tahun 2020 lampau.

Menariknya nama-nama investor dan aktor yang “berebut” dalam kedua proyek ini, adalah nama yang tidak jauh dari bisnis energi selama ini. Utamanya bisnis energi fosil seperti batu bara sendiri, di penghujung 2021 pemerintah bahkan mempercayakan proyek ini melalui konsorsium perusahaan Kawasan Industri Hijau Indonesia Tanah Kuning yang dipimpin oleh saudara Menteri BUMN, Erick Thohir, pemilik korporasi batu bara PT Adaro Indonesia, Garibaldi Thohir. Celakanya tanah-tanah dimana lokasi proyek akan dibangun juga adalah miliknya¹¹. Namun dibalik gemerlap klaim kawasan industri hijau dan energi bersih yang dilekatkan pada kedua proyek raksasa kawasan industri, pelabuhan dan pembangkit energi ini, ancaman daya rusak dan kondisi keselamatan rakyatnya justru disembunyikan dan tak diketahui oleh publik luas.

Proyek kawasan industri ini dibangun tepat berada di atas ruang hidup warga, yang akan mengancam lebih dari 5 ribu penduduk yang menghuni dua desa, Tanah Kuning dan Mangkupadi. Kebanyakan dari mereka adalah petani, pekebun dan juga nelayan. Ruang hidup mereka juga berkaitan dengan ekosistem pesisir dan perairan. Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bagaimana produktivitas para nelayan terus meningkat sebelum proyek-proyek ini datang. Sepanjang 2010 hingga 2014, tercatat kegiatan penangkapan ikan di laut Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan rata-rata mencapai 4,89 kali lipat atau sekitar 388,65%¹².

⁹ https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202211/t20221117_10976784.html, diakses pada 29 November 2022.

¹⁰ <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/6463/plta-kayan-mendukung-transisi-energi-di-indonesia?lang=1>, diakses pada 29 November 2022.

¹¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/lahan-kawasan-industri-hijau-kaltara-milik-boy-thohir-luhut-mungkin-rezeki-beliau>, diakses pada 29 November 2022.

¹² <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/KKHL/Dokumen%20RP%20dan%20RZ/RZ%20KK%20Tanjung%20Palas%20Timur%20Kaltara.pdf>, diakses pada 29 November 2022.

Desa Tanah Kuning pun juga dialokasikan sebagai kawasan konservasi perairan, karena ekosistem padang lamun, mangrove dan terumbu karangnya. Selain itu statistik juga mencatat potensi wisata bawah air dari keindahan bawah laut, bentang ruang hidup warga di Tanah Kuning dan Mangkupadi ini. Kesemua ini sudah pasti akan rusak dan hilang saat proyek datang.

Begitu juga dengan ruang hidup lain yang ikut dikorbankan untuk pembangunan proyek PLTA Kayan. Proyek bendungan seluas 184.270 hektare ini dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN tahun 2021-2030 menyebut selain untuk memasok listrik ibu kota baru di Kalimantan Timur juga akan dibangun untuk menyuplai kebutuhan listrik Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning-Mangkupadi di Kalimantan Utara. Proyek ini akan menenggelamkan 6 kampung diantaranya Desa Long Lejuh, Desa Long Peso, Long Bia, situs purbakala, makam keramat dan kehidupan di Desa Long Peleban Muara Pangiang dan Long Lian juga ikut terancam¹³.

Untuk itu melalui penulisan laporan ini, tim bermaksud untuk menindaklanjuti temuan dan informasi awal ini dengan melakukan penelusuran dan melakukan riset amatan permulaan ke lokasi tapak proyek kawasan industri dan ruang hidup di bentang pesisir Tanjung Palas Timur, Tanah Kuning dan Mangkupadi, juga ruang hidup kampung-kampung di sepanjang bentang tubuh Sungai Kayan, termasuk juga menyelidiki perkembangan rencana pembangunan PLTU batu bara 5 GW yang juga berada di kawasan industri ini. ■

¹³ <https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2022/11/Megaprojek-Ibukota-Baru-di-Indonesia-Final.pdf>, diakses pada 29 November 2022

3

TEMUAN PERMULAAN

Sebelum melakukan penelusuran ke tapak atau kunjungan lapangan, tim melakukan *desk research atau riset meja* sebagai bagian dari riset permulaan. Salah satunya dimulai dengan penelusuran kronologis kawasan yang akan dilakukan di kawasan penelitian dengan melakukan analisa melalui *delineasi* dan *overlay* yang keduanya, merupakan bagian dari operasi visual untuk menghasilkan analisis GIS/SIG (*Geographyc Information System atau Sistem Informasi berbasis Geografi*).

Terkait *deliniasi* luasan yang akan diteliti, Presiden Jokowi dalam kunjungannya saat *groundbreaking* akhir tahun 2021, mengklaim luasan kawasan industri ini mencapai 16.400 hektare dan disebut akan bertambah lagi 30 ribu hektare¹⁴. Namun pemerintah setempat menyebut luasan peruntukan kawasan industri saat ini masih seluas 10.100 hektare sesuai dengan kesepakatan *deliniasi* antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan pemerintah Kabupaten Bulungan, hal ini masih bisa bertambah sesuai permintaan pemerintah pusat, hal

¹⁴ <https://kaltara.tribunnews.com/2021/12/21/ketua-konsorsium-perusahaan-indonesia-dalam-kipi-beber-produk-kawasan-industri-hijau-di-kaltara?page=2>, diakses pada 29 November 2022.

ini juga akan dimasukkan dalam rencana perubahan atau revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan¹⁵.

a. Revisi RTRW Berulang-ulang Seharga “5 Miliar”

Menurut pemerintah daerah revisi RTRW Kabupaten Bulungan ini mesti dilakukan dengan menyesuaikan pada RTRW Provinsi Kalimantan Utara¹⁶. Bupati Bulungan mengatakan, jika melihat Peraturan Daerah (Perda) RTRW Bulungan 2013 lalu, kawasan industri yang ada hanya sebesar 3.800 hektare. Sedangkan kebutuhan KIPI sendiri mencapai 25 ribu hektare, untuk itulah akan dilakukan penyesuaian kembali. Namun dikatakan, tantangan tersulit dirasa terletak pada peralihan fungsi kawasan, yang sebagian besar daerah tersebut merupakan kawasan perkebunan¹⁷.

Untuk mempercepat proses revisi RTRW Bulungan, pemerintah Provinsi Kaltara sampai menyuntikkan dana 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Bulungan¹⁸. *“Sebab, jika RTRW Bulungan tidak diubah, maka gubernur tidak akan bisa menetapkan lokasi Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning yang sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017,”* ujar Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

Laju kejar tayang revisi RTRW ini bahkan tidak mengindahkan Pandemi Covid-19, mulai akhir 2020 hingga awal Februari 2021. Proses penomoran Perda RTRW ini disebut sempat tersendat karena para pejabat setempat di bagian hukum pemerintah daerah terpapar covid-19¹⁹. Pada akhirnya revisi RTRW Kabupaten Bulungan ini baru terjadi pada 1 April 2021, guna memuluskan megaprojek kawasan industri ini, Perda Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur tentang RTRW 2012–2032 akhirnya resmi diubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW 2021–2041²⁰.

Namun, untuk kembali mengakomodir kehendak Presiden Jokowi dan pemerintah pusat yang ingin kembali memperluas kawasan ini 30 ribu hektare, wacana revisi

¹⁵ <https://kaltara.tribunnews.com/2022/08/05/revisi-rtrw-kabupaten-pemkab-bulungan-sebut-lahan-kipi-tanah-kuning-mangkupadi-diperluas-380-ha> , diakses pada 29 November 2022

¹⁶ <https://kaltara.tribunnews.com/2022/08/05/revisi-rtrw-kabupaten-pemkab-bulungan-sebut-lahan-kipi-tanah-kuning-mangkupadi-diperluas-380-ha>

¹⁷ <https://amp.kaltara.prokal.co/read/news/19272-pemkab-pesimis-revisi-rtrw-selesai-tahun-ini>, diakses pada 29 November 2022.

¹⁸ <https://amp.kaltara.prokal.co/read/news/15741-rp-5-m-untuk-revisi-rtrw-bulungan>, diakses pada 29 November 2022.

¹⁹ <https://radartarakon.jawapos.com/daerah/bulungan/18/02/2021/revisi-rtrw-kota-ini-belum-disesuaikan/>, diakses pada 29 November 2022.

²⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/182082/perda-kab-bulungan-no-1-tahun-2021>, diakses 29 November 2022.

berulang atas RTRW ini kembali muncul. Karena itu pemerintah daerah Bulungan akan kembali merevisi Perda RTRW yang baru berumur 1,5 tahun tersebut²¹ demi hanya melayani rencana investasi.

b. Pemutihan Kawasan Berfungsi Penting?

Salah satu yang signifikan berubah, seperti yang sempat disinggung diatas adalah kawasan peruntukan industri, pada RTRW 2012-2032²², kawasan industri hanya seluas 4.294 hektare dan 3.832 hektare diantaranya berada di Tanjung Palas Timur, dimana Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi berada. Maka pada RTRW 2021–2041 peruntukan kawasannya naik 1 ½ kali lipat yakni 11.549 hektare yang 10.100 hektare diantaranya berada di Tanjung Palas Timur, Kecamatan tempat kompleks kawasan industri ini berada.

Bersamaan dengan itu kawasan-kawasan berfungsi penting bagi masyarakat seperti kawasan perikanan menyusut drastis dari 216.215 hektare menjadi hanya 40.361 hektare atau mengalami pengurangan hingga 5 kali lipatnya. Begitu juga kawasan wisata pantai yang diantaranya juga berada di Tanjung Palas Timur ikut menyusut dari 618 hektare menjadi hanya 79 hektare atau mengecil 7 kali lipat dari semula. Jika dilihat dalam peta hasil *overlay* Kawasan Industri KIH-KIPI dengan peta peruntukan atau alokasi ruang dalam Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang RTRW Bulungan 2012-2032 maka kawasan industri ini berada tumpang tindih dan beririsan dengan kawasan budidaya air payau, kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan konservasi sempadan sungai, kawasan peruntukan lahan pangan, pertanian berkelanjutan bahkan hingga kawasan pemukiman pedesaan.

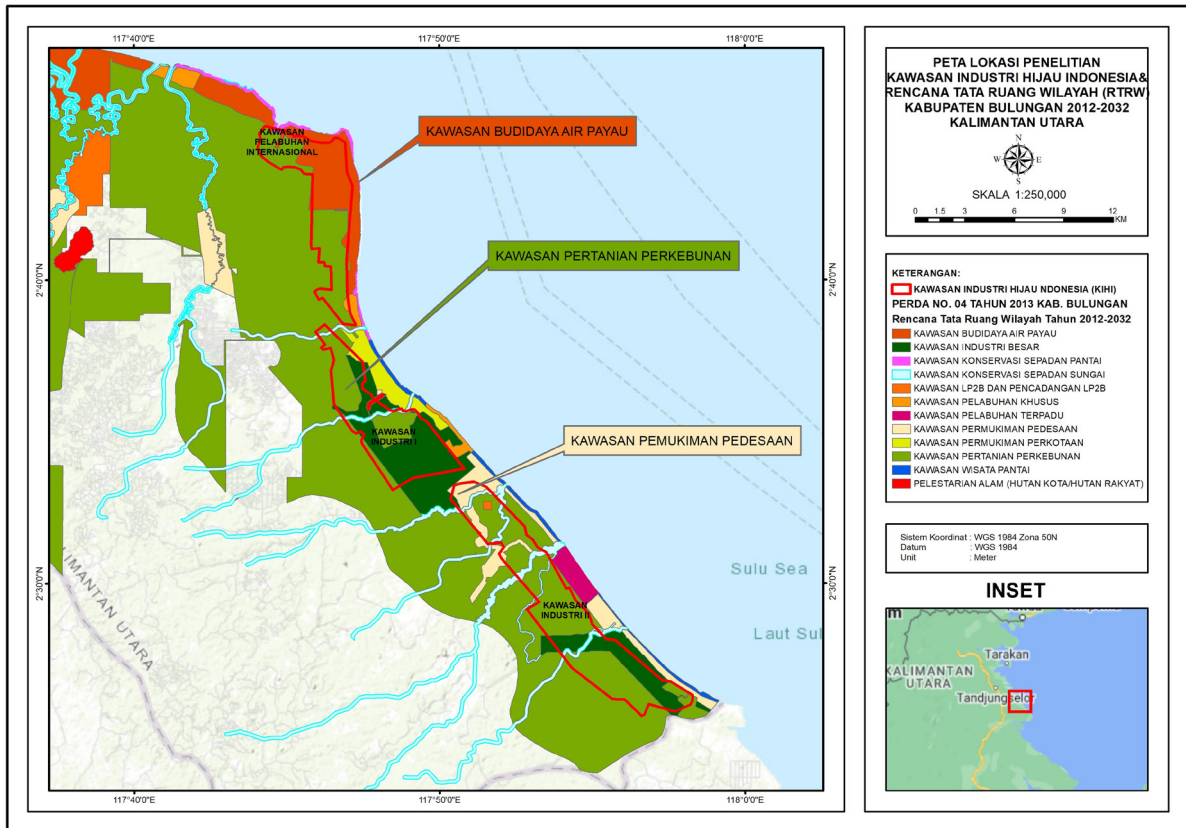
Sementara itu, jika kawasan pelabuhan internasional dimasukan dalam keseluruhan bagian dari Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), maka terdapat 4 desa yang dikapling oleh kawasan ini, bukan hanya Tanah Kuning dan Mangkupadi, namun juga Desa Sajau Timur dan Desa Binai. Di Mangkupadi, salah satu kampung yang akan digusur adalah Kampung Baru, yang dihuni mayoritas oleh masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan sisanya petani/pekebun.

Selain mengalihfungsikan kawasan penting di wilayah daratan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 64 tentang Tata Ruang Kabupaten Bulungan

²¹ <https://radartarakon.jawapos.com/daerah/bulungan/19/11/2022/lahan-kihi-diperluas-hingga-30-ribu-hektare/> dan <https://kaltara.tribunnews.com/2022/08/23/kawasan-industri-diperluas-30-ha-pemkab-bulungan-bakal-revisi-perda-rtrw-syarwani-arahan-presiden> , diakses pada 29 November 2022

²² <https://docplayer.info/33622517-Bupati-bulungan-peraturan-daerah-kabupaten-bulungan-nomor-04-tahun-2013-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-kabupaten-bulungan-tahun.html> , diakses pada 29 November 2022

Gambar 1. Peta *Overlay* Kawasan Industri KIHI-KIPI dengan Peta Peruntukan atau Alokasi Ruang Dalam Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang RTRW Bulungan 2012-2032



Gambar 2. Potret Udara Kampung Baru di Desa Mangkupadi, Salah Satu Desa yang Akan Digusur oleh Ekspansi Kawasan Industri PT KIPI-KIHI



Sumber Gambar Drone JATAM Kaltim 2023.



4

PROFIL TENANT DAN KAWASAN INDUSTRI

Dari penelusuran permulaan diatas lalu, tim mengakses dan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen penting diantaranya adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Adendum Andal RKL RPL milik PT KIPI untuk ditelusuri. Kawasan Industri Tanah Kuning yang dilabeli sebagai Kawasan Industri Hijau atau KIH di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ini adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijustifikasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ia juga didukung oleh PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang mencakup kemudahan tata ruang, pengadaan tanah, studi lingkungan hidup, penggunaan kawasan hutan, rencana induk sektor dan perencanaan pembiayaan.

Pada akhir tahun 2021, rencana pembangunan kawasan industri ini telah menyusun dokumen Amdal dan memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup (SKKL) nomor 503/004/KLH/DPMPTSP-IV yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Pintu Bulungan pada 13 Desember 2021²³. Akan tetapi saat ini, tahun 2022, salah satu pengelola kawasan industri atau pemrakarasa yakni PT KIPI sedang melakukan revisi *masterplan* rencana Kawasan Industri Tanah Kuning dan secara bersamaan sedang menyusun studi *addendum* Andal RKL RPL²⁴ untuk pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 366,36 hektare. Setelah mengajukan seluas 380 hektare untuk diakuisisi, tambahan pengembangan ini akan mengubah luas total Kawasan Industri Tanah Kuning dari semula 9.500 hektare menjadi 9.866,36 hektare. Khusus untuk pengembangan lahan, 366,36 hektare akan digunakan sebagai pengembangan *Blue Zone Industry* dan kurang lebih 20 hektare lainnya untuk penambahan fasilitas *helipad* di zona utara kawasan ini, lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga akan dirubah²⁵.

²³ Hal II-1, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

²⁴ Hal II-1, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

²⁵ Hal II-27, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

Proses pembebasan dan pengalihan lahan diatas luas 9.500 hektare sebelumnya juga sedang dalam proses legalisasi perubahan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang terdiri dari HGU Nomor 34 (957,24 ha), HGU Nomor 36 (534,22 ha), HGU Nomor 37 (4.505,42 ha) dan HGU Nomor 38 (1.820,49 ha), begitu juga dengan pengembangan luasan lahan 366,36 hektare yang juga sedang dalam proses pengalihan lahan dari HGU milik PT Kayan Patria Propertindo²⁶.

Pada rencana penggunaan lahan sebelumnya tahun 2021, terdapat 6 penggunaan lahan mulai dari industri, perumahan, komersial, jalan dan saluran, utilitas sarana penunjang dan ruang terbuka hijau keseluruhan berada diatas 9.500 hektare. Khusus untuk industri ini akan memiliki luas 6.100 hektare atau 64 persen dari seluruh lahan tersebut yang terbagi menjadi lahan untuk *blue zone industry* yang terdiri dari *petrochemical industry*, *steel industry*, *manufacture polycrystalline* seluas 3.910 hektare dan *green zone industry* terdiri dari *alumunium industry* dan industri manufaktur lainnya seluas 2.190 hektare. Namun, dengan adanya penambahan luasan *blue zone industry* seluas kurang lebih 366,36 hektare maka terjadi perubahan seperti yang dimuat dalam tabel berikut;

Tabel 1. Zona Industri Pada Rencana Kawasan Industri Tanah Kuning (Addendum 2022)

No.	Penggunaan Lahan (Land Use)	Luas (Hektare)		Keterangan
		Amdal 2021	Addendum 2022	
A	Blue Zone Industry			
1.	Petrochemical Industry	2.505,029	2.739,72	Meningkat 9,37%
2.	Steel Industry	673,928	737,07	
3.	Manufacture Polycrystalline	731,449	799,98	
	Sub Total	3.910,41	4.276,77	
B	Green Zone Industry			
1.	Alumunium Industry	778,620	778,620	Tetap
2.	Industri manufaktur lainnya (rencana pengembangan)	1.411,94	1.411,94	
	Sub Total	2.190,56	2.190,56	
	Grand Total	6.100,97	6.467,33	+366,36 ha

Sumber: PT KIPI, 2022

²⁶ Hal II-34-35, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

a. Industri Petrokimia (*Petrochemical Industry*)

Industri yang berkembang berdasarkan produk industri minyak bumi untuk memenuhi konsumsi bahan kimia. Industri di kawasan ini akan memproduksi industri petrokimia hulu antara lain *methanol, ethylene, propylene, butadine, benzene, toluene, xylenes, fuel coproducts, pyrolysis gasoline, pyrolysis fuel oil, raffinate* dan bahkan *mixed C4*. Fasilitas industri yang akan dibangun mulai dari *tower, reactor, compressor, pompa, pendingin* dan *furnaces*. Karena berbasis minyak bumi, maka kompleks industri petrokimia ini akan membutuhkan dalam jumlah besar *crude oil* sebanyak 64 ribu ton/tahun, 1-butene sebanyak 231 ribu ton/tahun, 1-hexene sebanyak 195 ribu ton/tahun hingga kebutuhan batu bara sebanyak 9.920.000 ton/tahun²⁷ termasuk untuk kebutuhan energi listrik sebanyak 4320 GWh pertahun. Sisanya industri ini juga akan mendatangkan sejumlah bahan kimia lain seperti *liquid alkali* 6 ribu ton/tahun, *sulfuric acid* sebanyak 12,8 ribu ton/tahun dan dengan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 10 ribu orang plus akan mengkonsumsi air sebanyak 1.350.000 m³ pertahun²⁸.

b. Industri Baja (*Steel Industry*)

Industri ini adalah bagian dari industri logam dasar dan juga termasuk industri hulu yang akan memasok bahan baku untuk Infrastruktur (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi), lalu untuk alat transportasi (kapal laut, kereta api dan otomotif) hingga persenjataan. Industri ini akan mendatangkan sejumlah bahan baku seperti *iron bearing fine ore, dolomite, anthracite* hingga *limestone*. Khusus untuk *limestone* atau batu kapur/batu gamping diperlukan sebanyak 6.966.700 ton/tahun. Industri ini juga akan mengkonsumsi batu bara yakni *coking coal* sebanyak 14,9 juta ton/tahun, *coal injection* sebanyak 2,8 juta ton/tahun, dan dengan kebutuhan listrik 3.628 GWh/tahun, dibutuhkan juga sebanyak 39 ribu tenaga kerja dan akan menghabiskan air sebanyak 31.268.560 m³ tiap tahunnya²⁹.

c. Industri Manufaktur *Polycrystalline* (Panel Surya) dan Industri Aluminium (Material Mobil Listrik)

Industri manufaktur *polycrystalline* ini adalah industri pembuatan panel surya dari jenis *polycrystalline*, yang terbuat dari biji kristal silikon tunggal dan silikon cair.

²⁷ II-9, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

²⁸ II-9, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

²⁹ II-10, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

Gambar 5. Spanduk Peringatan di Sekitar Rencana Wilayah Pembangunan Proyek Pabrik Alumunium dan PLTU Adaro Minerals di Mangkupadi



Silikon dituang, dicetak dan dibiarkan mendingin, membuatnya berbeda-beda suhu sehingga saat mendingin menghasilkan kristal yang berbeda-beda, membuat panel gemerlap dan beraneka warna seperti kristal. Operasi industri ini diklaim menyerap tenaga kerja sebanyak 46 ribu orang. Industri ini akan membutuhkan air skala besar sebanyak 6.832.000 m³ tiap tahun, termasuk menghasilkan air limbah skala gigantik sebesar 214.820,85 m³ pertahunnya³⁰.

Sedangkan industri alumunium adalah industri *electronic alumina*, yang mengolah bauksit menjadi alumina. Produksi turunannya berupa badan pesawat, kabel, kawat tembaga, tekstil dan alat-alat elektronik lainnya. Turunan Bauksit juga menjadi *Copper, Nickel Ore* dan menjadi material untuk memproduksi mobil listrik. Target produksi industri ini adalah 5 juta ton/tahun, tenaga kerja yang diserap diklaim sebanyak 13 ribu orang dan akan membutuhkan listrik 3.456 GWh/tahun, mengkonsumsi banyak air sebesar 17.191.500 m³/tahun termasuk meninggalkan air limbah sebanyak 14.191.500 m³ tiap tahunnya³¹. ■

³⁰ II-10, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

BOX I:

Masih Rakus Batu Bara dan Air

Dari profil tiap industri yang berada di *blue zone* maupun *green zone* di atas, keseluruhan industrinya bukan hanya rakus lahan atau membutuhkan lahan dengan skala besar namun juga terlihat rakus air dan rakus energi. Jumlah air yang dipakai dan air limbah yang ditinggalkan amat banyak termasuk mengenai urusan pemenuhan pasokan energi, industri ini masih sangat bergantung pada energi fosil, tidak seperti klaim sebelumnya yang menjual label hijau karena akan menggunakan energi non-fosil sepenuhnya. Total energi listrik yang akan digunakan adalah 11.404 GWh tiap tahunnya, ini belum termasuk industri manufaktur *polycrystalline*, karena datanya yang belum tersedia. Sementara itu pemakaian batu bara, hanya dari 2 jenis industri saja yang tersedia datanya di dokumen *Addendum ANDAL RKL-RPL* yakni industri petrokimia dan baja. Jika ditotal kebutuhan dari batu bara terdapat 27.620.000 ton tiap tahunnya. Ini belum dijumlah dari industri manufaktur *polycrystalline* (panel surya) dan industri alumunium (*electronic alumina* untuk mobil listrik). Jumlah 27,6 juta ton batu bara ini setara dengan produksi batu bara dari sebanyak 37 IUP batu bara yang ada di Kalimantan Utara³².

Selain itu juga pemakaian skala besar *limestone* atau batu kapur/batu gamping yang dipakai sebagai bahan campuran dan pemurnian dan pengolahan industri besi dan baja. Maka keduanya akan merangsang perusakan lebih besar di kawasan hulu di mana bahan-bahan ini berasal, lebih banyak lubang tambang batu bara akan digali dan lebih banyak bentang alam *karst* yang akan dikorbankan untuk dibongkar *limestone*-nya. Selain kegiatan industri sebagai kegiatan utama diatas juga akan dibangun kegiatan dan infrastruktur penunjang. Kegiatan penunjang³³ diantaranya pembangunan perumahan (*dormitory* dan *living area*) seluas 480 hektare untuk 115 ribu orang dalam bentuk unit rumah dan rumah susun. Fasilitas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja di atas 24.000 m² di desa Mangkupadi untuk 1.000 orang. Kantor pengelola diatas lahan 4 hektare untuk 250 orang, fasilitas peribadatan, fasilitas

³¹ II-10, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

³² Perhitungan diatas dengan acuan produksi batu bara dari 37 IUP tersebut pada tahun 2019 sebanyak 11.494.585 ton, silahkan cek <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/produksi-batu-bara-kaltara-capai-214-juta-ton/>.

³³ II-12, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

keamanan termasuk memfasilitasi pembangunan polsek bekerjasama dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Untuk infrastruktur penunjang jaringan kelistrikan akan dipenuhi oleh pembangkit listrik bersifat *captive* alias batu bara, sisanya diklaim lebih besar akan dipenuhi oleh pembangkit dari sumber energi terbarukan (*renewable energy*)³⁴.

Gambar 6. Dugaan Lokasi PLTU A dan PLTU B Captive di Desa Mangkupadi dan Plang Kegiatan Batu Bara yang Baru Muncul di Sekitarnya



Sementara untuk pemenuhan air bersih dan air baku, kawasan industri ini akan merampas air dari Sungai Pindada dan Sungai Mangkupadi Tawar yang dikapling berada dalam kawasan mereka. Selain itu juga disebut akan memanfaatkan air Sungai Kayan dan mengklaim akan mengolah air laut melalui *sea water reverse osmosis* dan air bauran dari pengolahan daur ulang air limbah³⁵. Keseluruhan dari data kebutuhan air pada tiga jenis industri ini akan menghabiskan 39.450.560 m³ tiap tahunnya itu setara dengan pemakaian 1 ½ tahun pemakaian sekitar 700 ribu penduduk di Kaltara³⁶. Hal ini belum dijumlah

³⁴ II-14, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

³⁵ II-14, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

³⁶ Jika jumlah penduduk Kaltara sekitar 700 ribu dan menggunakan asumsi dari data berikut; <https://pu.go.id/berita/pemakaian-air-rumah-tangga-perkotaan-144-liter-perhari>.

Gambar 7. Sungai Pindada di Desa Mangkupadi Kawasan KIPi



dengan keseluruhan kebutuhan air bersih dan air baku diluar kawasan industri yakni untuk kegiatan penunjang dan sarana penunjang seperti perumahan atau pemukiman. Dari neraca harian penggunaan air, disebut kegiatan utama industri tiap hari akan “menambang” air dari Sungai Pindada dan Sungai Mangkupadi Tawar sebanyak 258.543,27 m³ per hari dan kegiatan penunjang menghabiskan 28.030,62 m³ per hari³⁷. Itu berarti akan menghabiskan 95 persen dari debit dan volume harian Sungai Pindada dan Sungai Mangkupadi Tawar 286.573,88 m³.

Berdasarkan hal tersebut pula maka diperkirakan setiap harinya akan terdapat 286.439,86 m³ air limbah yang diklaim akan diolah sejumlah IPAL. Namun semuanya akan tetap berujung dibuang tiap empat jam sekali. Setiap pembuangan air limbah akan dibuang ke sejumlah badan air penerima yaitu Sungai Mangkupadi Asin, Sungai Pindada, Mangkupadi Tawar, Kalaputan Besar dan Sungai Kampung Baru³⁸. Ini belum lagi termasuk timbunan sampah dan limbah padat Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan limbah padat Non-B3 yang juga dihasilkan oleh tiap kawasan ini. ■

³⁷ Hal II-78, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

³⁸ Hal II-79, Addendum Andal dan RKL-RPL Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.

5

OLIGARKI DIBALIK KEDOK INDUSTRI HIJAU

Terdapat tiga perusahaan³⁹ yang menjadi pengelola kawasan industri ini yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Indonesia Strategis Industri (ISI) dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP). Presiden Jokowi kemudian menunjuk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir sebagai ketua Konsorsium Kawasan Industri ini pada Desember 2021, Boy akan mengendalikan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), ia adalah kakak kandung dari Menteri BUMN saat ini Erick Thohir.

Pebisnis batu bara dan pemilik Adaro Energy ini bak menerima 'durian runtuh', setelah sebelumnya pada tahun 2017, pemerintah lebih dulu menetapkan lahan yang membentang dari Desa Mangkupadi, Tanah Kuning hingga Binai di Pesisir Bulungan menjadi lokasi Kawasan Industri

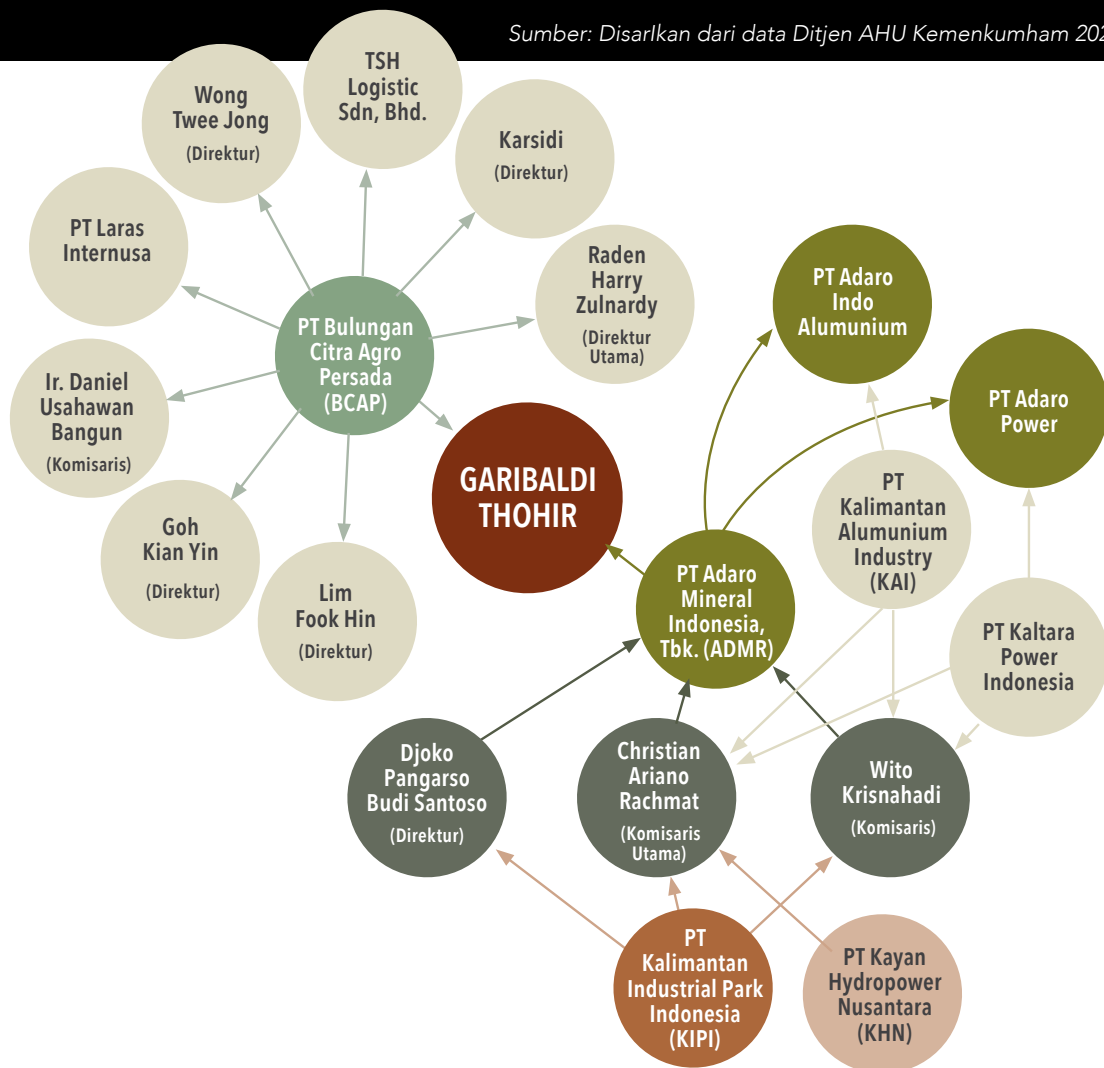
³⁹ <https://kilasdaerah.kompas.com/kalimantan-utara/read/2022/10/28/11450601/mengenal-lebih-dekat-perjalanan-kawasan-industri-raksasa-di-kaltara> , diakses 27 Januari 2023.

dan Pelabuhan Internasional (KIPI) yang kini dilabeli dengan nama baru Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) ini. Betapa tidak, 9.500 hektare dari 10.100 hektare kawasan itu berada pada lahan Hak Guna usaha (HGU) milik perkebunan kelapa sawit, PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang juga merupakan HGU milik Boy Thohir. Sahamnya menyempal di perusahaan sawit yang mayoritas sisanya dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia TSH Logistic Sdn. Bhd., bagian dari TSH Resources Berhad Malaysia⁴⁰.

Gambar 8. Tali Temali Kepemilikan Garibaldi Thohir dengan Adaro dan BCAP juga Kaitannya dengan PT KIPI, PLTA Mentarang dan PLTU di Bulungan



Sumber: Disarikan dari data Ditjen AHU Kemenkumham 2023.



⁴⁰ <https://newsletter.tempo.co/read/1553090/duet-maut-proyek-hijau>, diakses 27 Januari 2023.

Dari gambar peta aktor dan kepemilikan yang bersumber dari dokumen yang diakses melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 2023 ini, terlihat jejaring yang menghubungkan Boy Thohir dengan BCAP. Ia tercatat dalam dokumen masih sebagai komisaris utama perusahaan sawit ini. Selain itu Boy juga memiliki hubungan tidak langsung dengan PT KIPI melalui tiga "orang"nya atau representasinya yang terlihat dalam sebuah pola yang selalu muncul yakni Wito Krisnahadi, Christian Ariano Rachmat dan Djoko Pangarso Budi Santoso, ketiganya terhubung dengan Boy Thohir. Karena ketiganya duduk sebagai para komisaris dan direksi pada PT KIPI sekaligus juga komisaris dan direksi pada perusahaan-perusahaan group Adaro, contohnya Wito yang juga merupakan direktur PT Adaro Minerals Indonesia (ADMR).

Menyoal pertanyaan publik tentang ini, Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Pandjaitan mengaku bahwa awalnya ia tidak tahu siapa pemilik lahan tersebut. Karena lahan itu menurut Luhut, cocok untuk dijadikan Kawasan Industri Hijau dibandingkan dengan lahan lainnya. *"..Jujur, tadinya kami tidak mengerti siapa yang memiliki tanah ini. Setelah kami meninjau daerah ini dan mengirimkan tim, baru menemukan bahwa yang memiliki tanah adalah Pak Boy Thohir..,"* kata Luhut.

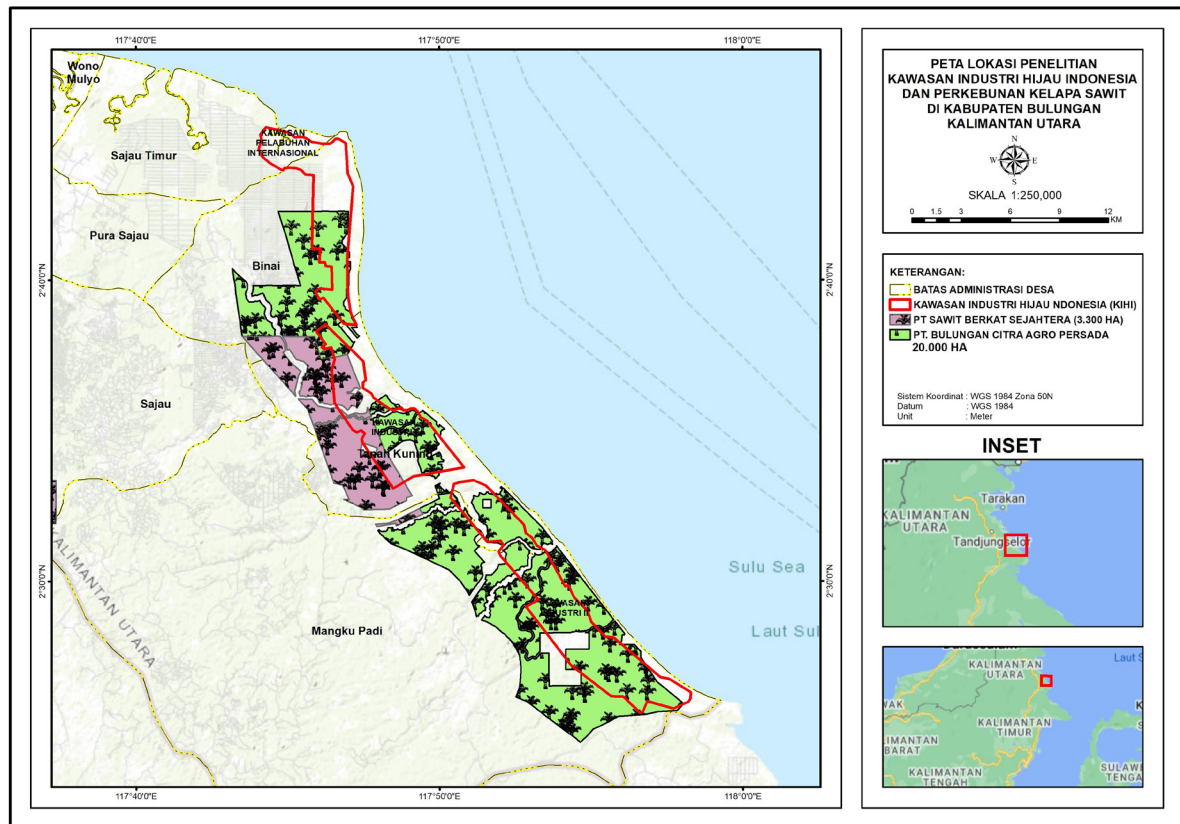
Tidak ada pilihan lain karena semua tanah di kawasan ini yang paling menarik adalah daerah ini. *"Jadi mungkin rezekinya Pak Boy Thohir juga,"* kata Luhut⁴¹.

Dari hasil *overlay* dengan perkebunan kelapa sawit, kawasan industri ini bukan saja tumpang tindih dengan PT Bulungan Citra Agro Persada namun juga dengan PT Sawit Berkas Sejahtera (SBS) yang memiliki status IUP522.1/15/EK/IL-IV/2011521/24/IUP/DISTAN-III/VIII/2007.

Dalam kawasan KIPI, Adaro Minerals Indonesia akan mengelola *tenant* industri alumunium. Industri ini adalah industri *electronic alumina*, yang mengolah bauksit menjadi alumina. Produksi turunannya berupa badan pesawat, kabel, kawat tembaga, tekstil dan alat-alat elektronik lainnya. Turunan bauksit juga menjadi *copper*, *nickel ore* dan menjadi material untuk memproduksi mobil listrik. Kesemuanya diperkirakan akan diselenggarakan oleh PT Kalimantan Alumunium Industri (KAI) yang dibentuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Indo Alumunium dan 10 pemegang saham, komisaris dan direksi lainnya, diantaranya yang menarik untuk diamati adalah Cita Mineral Investindo (CMI).

⁴¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/lahan-kawasan-industri-hijau-kaltara-milik-boy-thohir-luhut-mungkin-rezeki-beliau>, diakses 27 Januari 2023.

Gambar 9. Peta Overlay Tumpang Tindih Kawasan Industri KIPI-KIHI dengan Konsesi HGU Perkebunan Sawit PT BCAP dan Perkebunan Sawit Lainnya



Cita Mineral Investindo adalah emiten pertambangan bauksit yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Harita Jayaraya (Harita Group) sebesar 60,64%. Harita Jayaraya adalah perusahaan milik Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, berusia 94 tahun, orang terkaya ke-20 di Indonesia versi *The Real-Time Billionaires Forbes* dengan kekayaan US\$1,1 miliar. Dia disebut-sebut juga sebagai kakek terkaya di Indonesia⁴². Harita Group adalah penyebab utama dibalik daftar derita warga di Pulau Obi, Maluku Utara dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Dua pulau kecil ini tengah diluluhlantakkan oleh operasi tambang dan pabrik *smelter* nikel milik keluarga konglomerat Lim Hariyanto Wijaya Sarwono ini.

Sementara itu pengelola kedua KIHI, adalah PT Indonesia Strategis Industri (ISI). Pemiliknya, Tjandra Limanjaya, yang bisnisnya terhubung di sektor pembangkit listrik. Lewat perusahaan PT General Energy Bali (GEB). Tjandra menggarap pembangkit listrik tenaga uap kontroversial di Celukan Bawang, Bali⁴³, ia juga

⁴² <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a51e3103f5c/kakek-terkaya-di-ri-masuk-ke-smelter-aluminium-grup-adaro>, diakses 27 Januari 2023.

⁴³ <https://www.gatra.com/news-539496-nasional-pejabat-dan-pengusaha-berebut-pabrik-pembangkit-listrik-di-kalimantan.html>, diakses 27 Januari 2023.

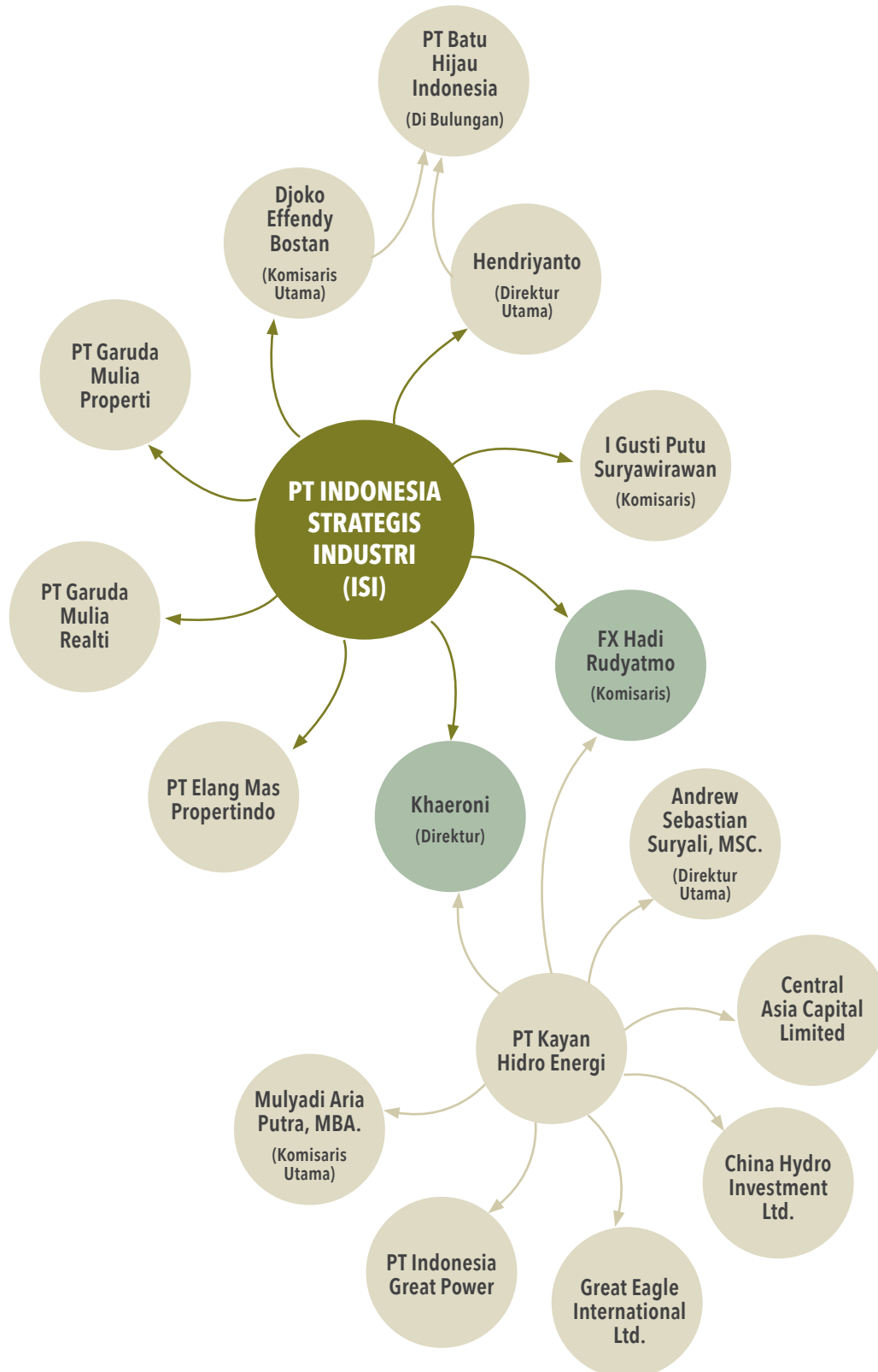
Gambar 10. Peta Temali Relasi PT KIPI, PLTA, Adaro dengan Kelompok Bisnis Harita Jayaraya (Harita Group) Milik Lim Hariyanto, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Versi Forbes



sempat tersandung kasus pemalsuan bank garansi dan pencucian uang berkaitan dengan proyek pembiayaan PLTU Celukan Bawang tersebut⁴⁴. Namun jika diperiksa dalam dokumen-dokumen kepemilikan saham, jajaran komisaris dan direksi pada data Ditjen AHU tahun 2023, PT ISI ini terhubung dengan PT Kayan Hydro Energi (KHE) yang disebut-sebut sebagai salah satu calon pemasok listrik ke ISI dan kawasan industri ini. Keterhubungan tersebut ditunjukkan melalui sosok Khaeroni yang menjabat sebagai direksi di PT ISI maupun di PT KHE sekaligus.

⁴⁴ <https://www.lensaIndonesia.com/2015/08/25/divonis-7-tahun-direktur-pt-geb-tjandra-limanjaya-belum-ditahan.html>, diakses 27 Januari 2023.

**Gambar 11. Peta Temali Relasi PT ISI dengan PT Kayan Hydro Energi (KHE)
Termasuk Munculnya Nama Politisi Elit PDIP dan Mantan Walikota serta Mantan Pasangan
Jokowi saat Menjadi Walikota di Solo, FX. Hadi Rudyatmo**



Yang juga menarik adalah munculnya keterhubungan kedua perusahaan ini melalui munculnya nama mantan walikota Surakarta/Solo dan sekaligus mantan pasangan wakil Joko Widodo sebelum mencalonkan sebagai Presiden pada periode 2010 - 2012 yakni FX. Hadi Rudyatmo. Ketua DPC Kota Solo dan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menjabat sebagai Komisaris di PT ISI dan PT KHE juga.

Rencananya, suplai listrik untuk kawasan industri yang dikelola PT ISI nantinya berasal dari PLTA Sungai Kayan⁴⁵. Pengembang pembangkit ini yaitu PT Kayan Hydro Energi (KHE) kepemilikannya juga ada di tangan Tjandra. Sebenarnya selain PT KHE juga terdapat nama PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) yang merupakan afiliasi dari proyek PLTA Mentarang. PLTA yang memiliki rencana jumlah kapasitas pasok yang berbeda, berada di lokasi lain yakni di Sungai Mentarang dan Sungai Tubu Kabupaten Malinau, keduanya sama-sama terlihat berebut untuk mengaliri listrik ke KIH.

Namun sejak izin lokasi diperoleh pada tahun 2012 hingga saat ini, pergerakan PT KHE dianggap lamban, meskipun pada 6 Oktober 2022, PT KHE menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Sumitomo Corporation Jepang dengan nilai investasi 17,8 miliar atau 267 triliun rupiah⁴⁶. Pemerintah daerah nampak ragu. Keraguan itu terpancar dari masuknya PT Pembangkit Indonesia Epsilon, berselang beberapa minggu pada September-Oktober 2022. Perusahaan yang berafiliasi dengan PT KIPI ini, menurut penuturan sejumlah pejabat daerah di Bappeda Kaltara muncul setelah rapat-rapat yang digelar bersama Kementerian Koordinator maritim dan investasi⁴⁷.

Sedangkan pengelola ketiga adalah PT Kayan Patria Propertindo. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT Kayan Patria Pratama Group milik oligarki politik dan bisnis lokal terbesar di Kalimantan Utara, Lauw Juanda Lesmana⁴⁸. Rentang bisnisnya terbentang mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan, perkapalan hingga properti dan perhotelan. Lauw Juanda Lesmana memiliki koneksi dekat dengan mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie⁴⁹ dan barisan pejabat tinggi daerah lainnya di Kaltara⁵⁰. Lauw Juanda Lesmana melalui perusahaan PT Kayan Patria Pratama Group juga bagian

⁴⁵ <https://www.antaranews.com/berita/3162509/bangun-plta-kayan-cascade-pt-kayan-hydro-energy-khe-gandeng-sumitomo-corp-jepang>, diakses 27 Januari 2023.

⁴⁶ <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/06/10/2022/kayan-hydro-energy-gandeng-sumitomo-corporation-bangun-plta-kayan/>, diakses 27 Januari 2023.

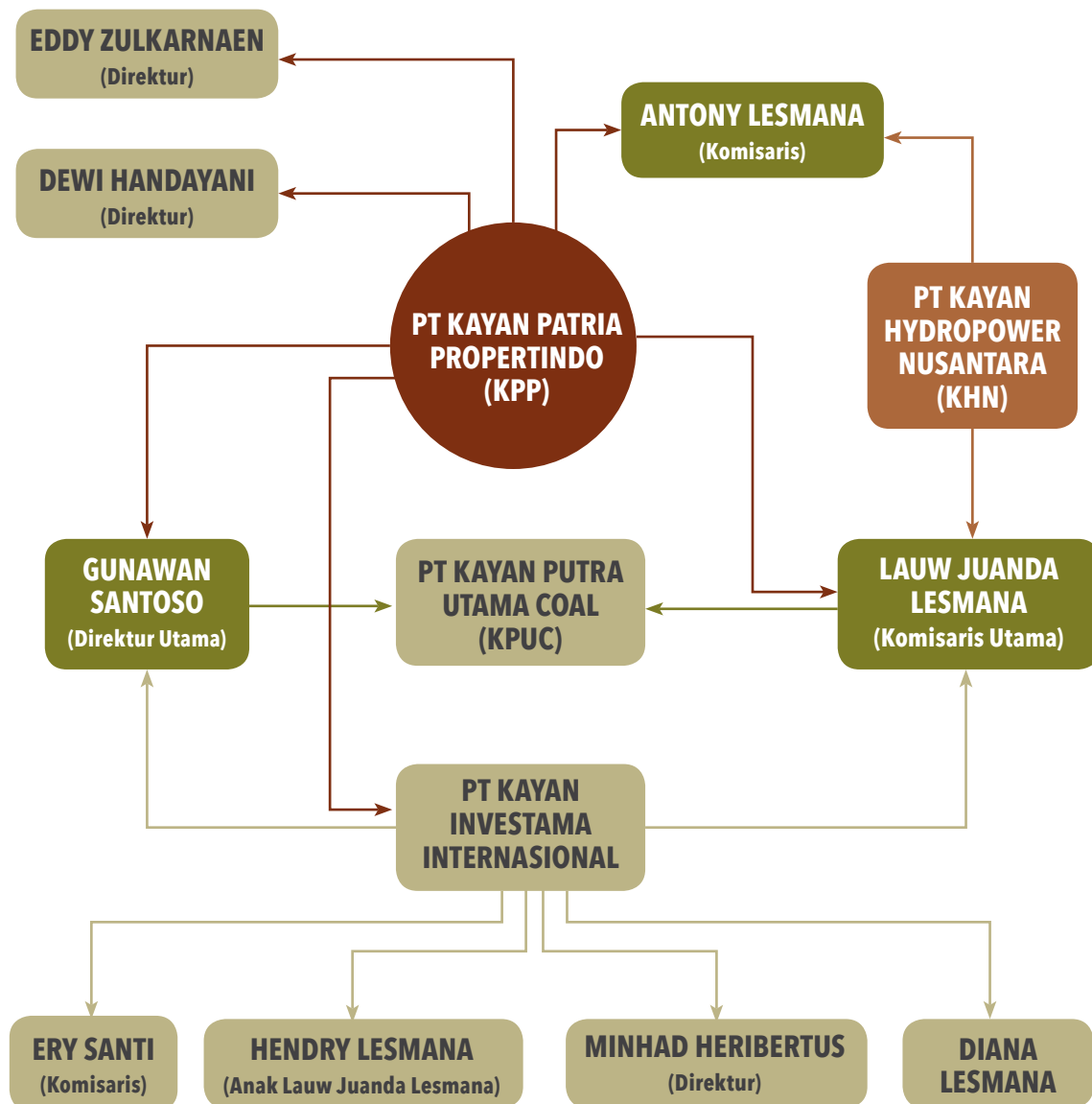
⁴⁷ <https://korankaltara.com/khe-dianggap-lambat-epsilon-masuk-garap-plta>, diakses 27 Januari 2023.

⁴⁸ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/08/nama-pengusaha-kaya-juanda-lesmana-mencuat-dampingi-irianto-lambrie-di-pilkada-kalimantan-utara-2020>, diakses 27 Januari 2023.

⁴⁹ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/08/nama-pengusaha-kaya-juanda-lesmana-mencuat-dampingi-irianto-lambrie-di-pilkada-kalimantan-utara-2020>, diakses 27 Januari 2023.

⁵⁰ <https://betahita.id/news/detail/6929/di-balik-gelap-dan-berlikunya-informasi-pencemaran-pt-kpuc.html.html>, diakses 27 Januari 2023.

Gambar 12. Peta Kepemilikan PT KPP dan Afiliasinya dengan Berbagai Perusahaan Lauw Juanda Lesmana



dari “Joint Venture” PT Kayan Hydropower Nusantara yang disebut sebelumnya tadi sebagai pesaing PT Kayan Hydro Energy sesama pemegang proyek PLTA dalam memasok setrum ke KIH. PT KPP bersama memegang saham PT KHN dengan Sarawak Energy⁵¹ dari Malaysia. ■

⁵¹ <https://www.ptkhn.com/id/>, diakses 27 Januari 2023.

BOX II:

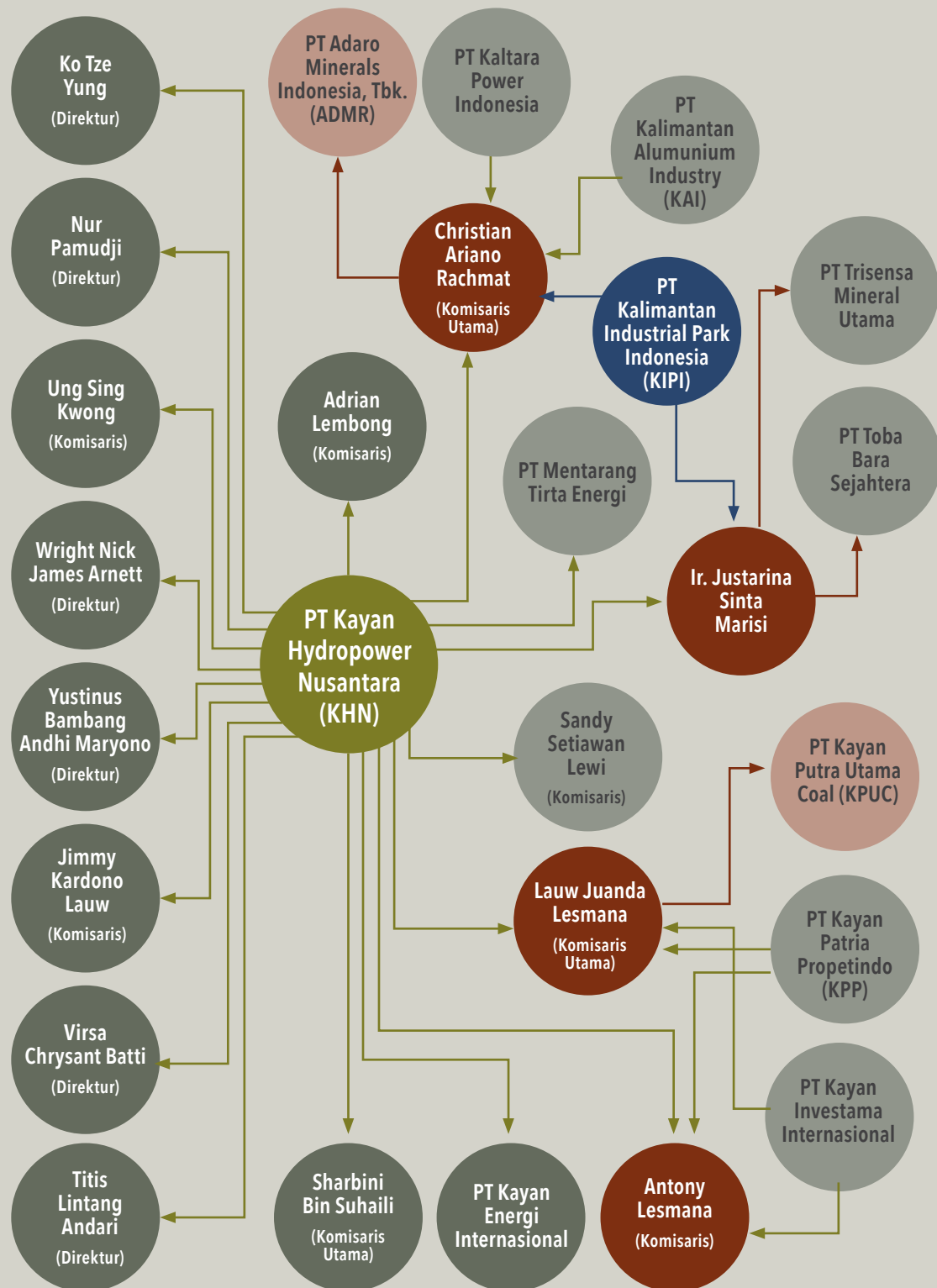
LUHUT, THOHIR & JUANDA LESMANA BERJUMPA DALAM SATU BELANGA

Pada 12 Oktober 2022, pemegang proyek Mentarang Hydro Electric Dam Project dengan kapasitas 1.375 megawatt ini berubah nama dan diambil oleh PT Kayan Energy International, yang saham-sahamnya dikuasai masing-masing oleh PT Mentarang Tirta Energy, Sarawak Energy Services Sdn. Bhd. dan PT Kayan Investama International⁵². Menariknya PT Kayan Hydropower Nusantara yang akan menyuplai listrik kepada Pengelola PT Kayan Patria Propertindo melalui PLTA Mentarang. Ini nampak di dukung oleh kekuatan lain diluar sekedar Oligarki lokal, Lauw Juanda Lesmana akan tetapi juga terhubung dengan "orang-orang" Boy Thohir melalui Christian Ariano Rachmat begitu juga "orang-orang"

KHN memiliki relasi atau menjadi pusaran pertemuan antara Luhut, Boy dan juga Juanda, ini membuat posisi PT KHN dan PLTA Mentarang lebih unggul dari PT KHE dan PLTA Kayan.

⁵² <https://www.ptkhn.com/id/>, diakses 27 Januari 2023.

Gambar 13. Peta Pemilik Saham dan Relasi PT Kayan Hydropower Nusantara yang Mempertemukan Adaro Minerals Indonesia (ADMR) dengan Orang-Orang Luhut dan Oligarki Lokal, Lauw Juanda Iesmana



Gambar 14. Seremoni *Groundbreaking* PLTA Mentarang di Malinau, PLTA ini Juga Berstatus PSN dan Menyalip PLTA Kayan yang Sudah Hampir 12 Tahun Diwacanakan



Sumber gambar:

<https://kaltara.antaranews.com/berita/500976/groundbreaking-plta-mentarang-presiden-dukung-transformasi-indonesia-menuju-ekonomi-hijau>.

Gambar 15. Peta Lokasi PLTA Mentarang



Sumber: <https://www.ptkhn.com/id/>.

Luhut melalui Ir. Justarina Sinta Marisi Naiborhu keduanya adalah direksi dan komisaris PT KIPI juga.

Sehingga KHN memiliki relasi atau menjadi pusan pertemuan antara Luhut, Boy dan juga Juanda, ini membuat posisi PT KHN dan PLTA Mentarang lebih unggul dari PT KHE dan PLTA Kayan, terlihat pada disusulnya pemberian status sebagai Proyek Strategis Nasional dan *groundbreaking* kepada proyek ini pada Rabu, 1 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo di Malinau.

Hal ini juga membuka kesempatan PT KHN dan PLTA Mentarang untuk tidak hanya menyokong kebutuhan listrik PT KPP namun tidak menutup kemungkinan juga menyokong listrik PT KIPI. Meskipun dalam realitasnya PT KIPI yang merupakan wajah lain dari kepentingan Boy dan Luhut ini sementara akan tetap disuplai oleh batu bara melalui sejumlah proyek PLTU Captive dan proyek PLTU Kaltara Power.

Selain investor-investor itu, dalam beberapa pertemuan sebelumnya juga pernah muncul nama Fortescue Metal Group milik taipan Australia. Terutama setelah perbincangan Andrew Forrest pemilik group ini dengan Menteri Koordinator Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di penghujung tahun 2020 lampau. Pada Desember 2021, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menandatangani perjanjian kerja sama dengan Fortescue Future Industries dan Fortescue Metals Group Ltd. (FMG), Andrew Forrest mengatakan berniat menjadikan Indonesia sebagai eksportir hidrogen hijau.

Perusahaan asal Australia ini pada saat itu diberitakan oleh Kantor Berita Republik Indonesia (KBRI) di Canberra akan menggelontorkan Rp180 triliun untuk Kaltara. Ini merupakan bagian dari rencana investasi Fortescue sebesar US\$10 miliar di Provinsi Papua dan Kalimantan Timur⁵³. ■

⁵³ <https://investor.id/business/312821/fortescue-mari-jadikan-ri-eksportir-hidrogen-hijau-yang-hebat>, diakses 27 Januari 2023

6

**YANG HILANG
DAN YANG RUSAK;
TEMUAN LAPANG
DAYA RUSAK
DAN ANCAMAN
KESELAMATAN
DI TANAH KUNING
HINGGA
KAMPUNG BARU**

Setelah melakukan penelusuran di lapang, tim menemukan bahwa metabolisme sosial tidak bisa dilepaskan dari ekosistem sekitarnya, metabolisme atau daur hidup ekonomi perikanan tangkap yang direpresentasikan oleh nelayan dengan berbagai jenisnya misalnya bergantung pada ekosistem karang kesehatan air dan pesisirnya.

Begitu juga perubahan sosial dan ekologis yang menjadikan “bau” atau “aroma” dan “visual” di Kampung Baru dan Pindada sebagai penanda seperti yang disampaikan oleh Wiwi adalah juga penanda suatu yang

“Sekarang ini engga ada lagi bau ikan asin juga bau teri. Dulu dijemur, kalau kita jalan tercium baunya sepanjang jalan. Dulu juga kalau kita jalan dari Kampung Baru ke Pindada, hijau pemandangan, sekarang sudah digusur semua sama industri. Yang kita hirup bukan lagi bau ikan dijemur tapi bau debu kendaraan besar sudah!”

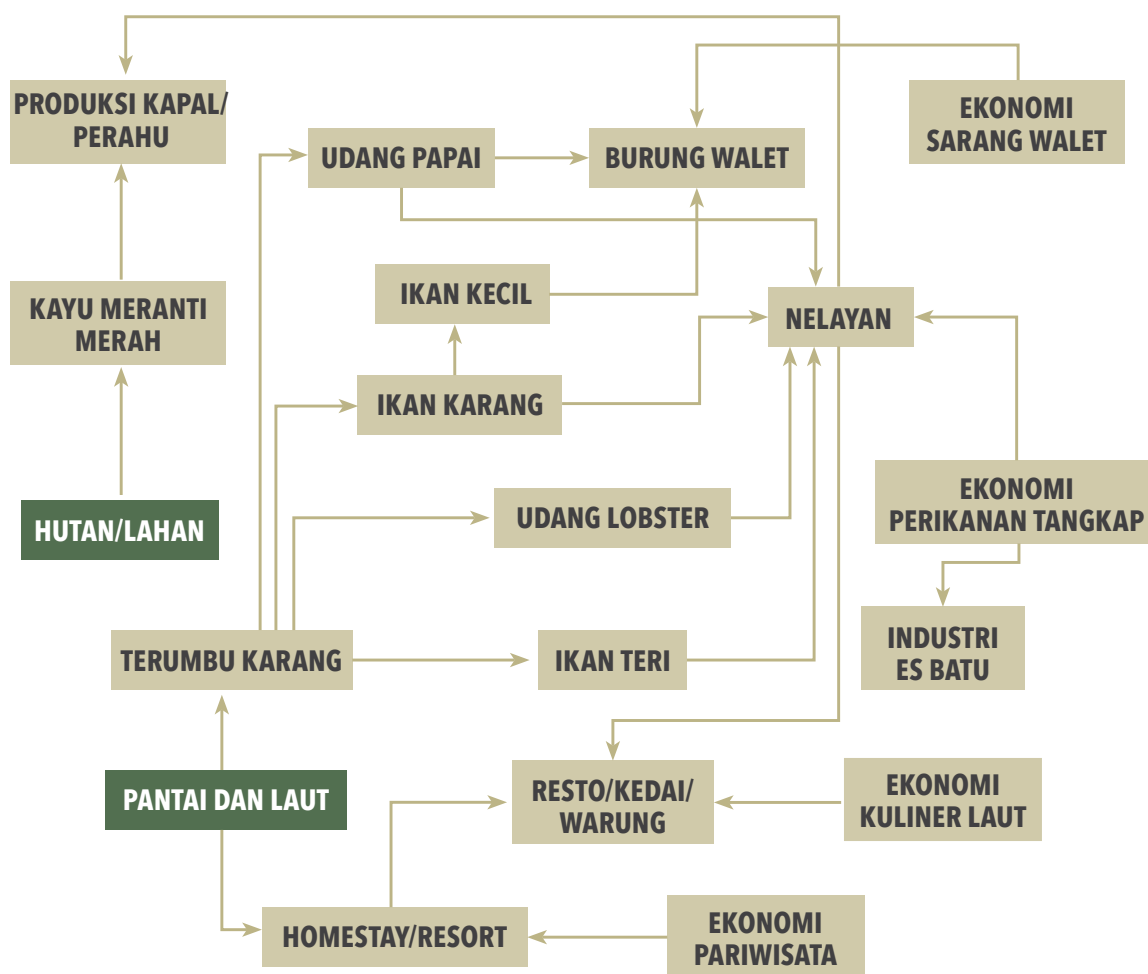
Wiwi – 45 tahun, Kampung Baru



Gambar 16. Perahu Nelayan dan Pemukiman Nelayan di Tanah Kuning

disebut *Metabolic Rift* atau keretakan metabolisme sosial dan ekologis⁵⁴. Perubahan metabolisme terjadi karena gangguan pada rerantai sosio ekologis, yang saling berhubungan, di Tanah Kuning dapat digambarkan melalui peta analisis berikut:

Gambar 17. Peta Analisis Relasi Ekosistem Setempat Dengan Ekonomi yang Berlangsung Saat Ini



Dari peta analisis di atas terlihat bagaimana kesehatan pesisir (khususnya Karang Laut) dan laut juga hutan merupakan bagian dari rerantai sosial dan ekologis bagi kegiatan sosial dan ekonomi warga di sana. Dari peta juga terlihat apa saja yang akan hilang dan akan rusak jika operasi kawasan industri diteruskan atau diperluas.

⁵⁴ <https://arc.or.id/ringkasan-diskusi-metabolic-rift-dan-perubahan-sosio-ekologis-di-kawasan-gambut-kalimantan-tengah/>, diakses 23 Maret 2023.

Gambar 18. Potret Udara Desa Tanah Kuning



Sumber: Drone JATAM Kaltim 2023.

Luas wilayah Desa Tanah Kuning adalah ± 20.000 ha dimana 65% berupa daratan dengan topografi berbukit-bukit dan bersambung dengan pesisir pantai dan laut Selat Sulawesi. Desa Tanah Kuning merupakan desa pesisir pantai dikarenakan batas langsung desa di sebelah timurnya adalah Laut Sulawesi. Hal ini berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk di Desa Tanah Kuning. Selain menjadi petani, masyarakat di Desa Tanah Kuning sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Desa Tanah Kuning mempunyai jumlah penduduk 2.843 jiwa, yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 1.540 jiwa dan perempuan yang berjumlah 1.303 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 697 Kepala Keluarga (KK)⁵⁵.

Pantai berpasir putih dan keindahan pemandangan laut sebagai daya tarik. Lokasi ini dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 4 jam atau jalur air menggunakan *speedboat* perjalanan dari Tanjung Selor. Sekitar tepian pantai dijadikan tempat transaksi jual beli ikan antara warga desa dan nelayan bagan tangkap. Pada saat hari libur warga dari luar daerah (Tanjung Selor, Sajau, Binai, dll) akan datang ke Desa Tanah Kuning untuk menikmati liburan, ada yang datang bersama keluarga untuk rekreasi dan ada juga yang datang untuk memancing di sekitar dermaga pantai untuk menghabiskan akhir pekan mereka.

⁵⁵ Bulungan Dalam Angka, 2022.

Sementara Mangkupadi adalah desa tetangganya, masih di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Kata Mangkupadi, menurut beberapa literatur pemerintah berasal dari bahasa Berau, *mangko* artinya mangkuk dan *padi* adalah padi, *mangkupadi* adalah tempat padi. Desa Mangkupadi dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis yang beragam karena berada di dekat pantai antara lain Bugis, Bajau, Jawa dan Banjar.

Kampung Baru merupakan salah satu kampung yang berada di dalam Desa Mangkupadi. Jumlah kepala keluarga di kampung ini berkisar 200 KK dengan rata-rata pekerjaannya sebagian besar adalah nelayan tangkap dan bagan, petani dan sebagian kecil adalah pedagang.

a. Potret Status Keselamatan Air, Pangan dan Energi Warga Setempat

Warga di Tanah Kuning mendapatkan air minum untuk konsumsi sehari-hari dari membeli galon air isi ulang di depo air minum. Sumbernya dari sumur bor yang menggunakan mesin. Dahulu sebelum membeli galon air isi ulang mereka memasak air dari sumur galian biasa disekitar kampung. Menurut mereka air dari sumur galian masih layak konsumsi, walaupun dekat pantai dan laut. Terdapat juga beberapa aliran sungai, namun tidak dimanfaatkan. Warna airnya agak hitam dan kemerahan. Warga Tanah Kuning didominasi warga dengan darah Bugis, sisanya Jawa, terdapat juga orang Bajau dari Mangkupadi.

Masih masuk dalam wilayah Desa Tanah Kuning yakni Tanjung, wilayah ini memiliki kontur dan kondisi geografis berbeda, hal itu disampaikan oleh Erni warga Tanjung pengaruhnya dengan kondisi pemenuhan air warga.

"Kalau air berasal dari air hujan, kami tampung untuk mandi cuci. Nggak ada sumur disini, karena airnya asin. Di bawah sana (pantai, wilayah lebih rendah) airnya putih, tawar itu. Tapi kami ngebor kemarin airnya kebanyakan zat besi. Warnanya bening, tapi lengket, berkarat di pinggir ember," ujar Erni menceritakan. *"Kami tampung pakai profil aja, pakai 7. Tapi cepat habis juga. Kalau pulang semua anak-anak ke rumah cepat habis, jadi beli lagi".*

Erni mengaku juga menggunakan air hujan namun kadang sampai 2 bulan tidak ada hujan menyebabkan airnya tidak bisa ditampung karena berdebu. Sudah 10 tahun Erni dan keluarganya menggunakan air hujan sebelum akhirnya membeli air galon tahun 2019, rata-rata ia menggunakan sampai 3 galon dalam seminggu. Tak hanya membeli galon ia juga terpaksa membeli air tandon.

**Gambar 19. Profil Tank untuk Menampung Air Hujan
di Belakang Rumah Erni, Warga Tanjung, Tanah Kuning**



"Kalau nggak ada hujan kami beli air tandon, 1.200 liter biasanya 100 ribu. Orang biasanya ambil air di atas atau dimana tau, kita cuma tahu beli saja, itu kalau habis air saja."

Warga di Tanjung menurut Erni tidak bisa mengandalkan air sumur bor seperti warga di bawahnya, warna dan aroma disebut Erni berubah.

"Kalau orang bawah masih bisa pake sumur bor. Disana airnya nggak asin, ga tau kenapa, di Mangkupati juga disana sumur bornya bagus, disana putih airnya. Naik sini airnya jadi merah."

"Kalau air berasal dari air hujan, kami tampung untuk mandi cuci. Nggak ada sumur disini, karena airnya asin. Di bawah sana (pantai, wilayah lebih rendah) airnya putih, tawar itu. Tapi kami ngebor kemarin airnya kebanyakan zat besi. Warnanya bening, tapi lengket, berkarak di pinggir ember."

Erni – 42 tahun, warga Kampung Tanjung

Persoalan air yang lainnya adalah tidak beroperasinya sumur bor dari pemerintah, *"Dulu ada PDAM (ESDM) di atas sini, sudah dipasang apa gitu tapi mangkrak. Tapi sudah jadi, karna nggak kuat pompa airnya mungkin"* Erni bergegas menunjukan profil berwarna biru di seberang rumahnya.

Masalah air yang dihadapi Erni dihadapi juga warga di RT yang lain, *"warga Tanjung sini ada sekitar 4 RT, semua di Tanjung. Disini RT 6, 7, 11 sama 8. RT 7 sini yang paling banyak penduduknya, perkiraan di sini sih lebih dari 100 penduduknya, yang lain saya kurang tahu," "Kalo RT 7 ini iya bergantung sekali sama hujan, kalau RT sana kan ada sumur, bisa buat cuci-cuci masih aman,"* ujanya menyadari.

Belum ada kesimpulan mengenai air, namun dari perbincangan warga sudah mengidentifikasi bahwa krisis air (tawar) adalah ancaman terdekat. Jika terjadi sesuatu pada sumur-sumur air di sekitar pantai seperti intrusi air laut yang asin atau pencemaran udara yang menyebabkan air hujan terkontaminasi, ratusan warga RT 7 di Tanjung keselamatan airnya dipertaruhkan.

Gambar 20. Fasilitas Air Sumur Bor yang Dibuat oleh Badan Geologi ESDM Namun Mangkrak, Tak Berfungsi di Pemukiman Warga Tanjung, Tanah Kuning



b. Potret Keselamatan Pangan

Melalui perbincangan mengenai pengecekan kondisi pemenuhan pangan, Siti Hawa (47 tahun) salah satu pemilik warung makan di Tanah Kuning mengungkapkan beras dan sayur di sekitar Tanah Kuning bergantung pada wilayah lain. Sesuai dengan kebutuhan warung makannya, ia rata-rata membeli 20 kilogram beras setiap tiga hari sekali, beras-beras yang beredar dan yang ia beli hanya berasal dari dua tempat yakni dari Tanjung Selor (ibu kota Kaltara) dan berasal dari Berau, kabupaten tetangga.

"Saya beli beras dari Berau karena lebih murah dari pada Tanjung Selor. Di Tanjung Selor 270 untuk 20 kilo, kalau dari Berau agak mending dia 13 setengah atau dia bisa 14 kalau sekilogram itu beras. Tanjung Selor 2 jam dari sini." "Nah kalau beras dari Berau 13 ribu jadi selisih seribu, ada yang 500, 500 sampai seribu. Berau kurang lebih juga, ada 2 jam, ada 2 jam setengah. Jauh sedikit tapi harga beras lebih murah."

Menurut Siti tidak ada beras lokal, ada beras di Sajau, *"Mereka disana menanam untuk kebutuhan sendiri,"* ujar Siti. Sajau adalah desa tetangga namun berasnya tidak beredar di Tanah Kuning. Ia mengaku tidak pernah membelinya, sehingga warga Tanah Kuning nyaris memenuhi seluruh kebutuhan berasnya dari luar. Siti sejak 2015 memenuhi kebutuhan beras untuk konsumsi sendiri maupun warungnya dengan membeli beras luar.

Sementara untuk kebutuhan sayur-mayur, Siti menjelaskan bahwa kangkung, terong dan wortel berasal dari Tanjung Selor, berbeda dengan bayam dan labu, warga Tanah Kuning membelinya dari desa tetangga Sajau. Siti yang tahun 2015 baru datang dari merantau dari Sulawesi ini menyebut jika harga-harga sayur lumayan mahal jika dibandingkan dengan tempat asalnya di Sulawesi.



**Gambar 21. Siti Hawa (47 tahun)
Menunjukkan Kemasan Beras yang Tiap
Minggu Ia Beli dari Luar Tanah Kuning**

"Labu disini kalau eceran 10 ribu, di sana nggak sampai 10 ribu kalau satu begini besar. Kangkung seribu dua ribu, dis ini lima ribu. Tomat dari Berau juga 17 ribu sekilo."

Lebih lanjut Siti menceritakan untuk memasak warga mayoritas sudah menggunakan kompor gas elpiji isi 3 kilogram. *"Harganya 50 dari Berau bilanganya (ujar penjualnya) kadang beli ke Tarakan juga diantar bapak, pakai Sadewa (nama kapal speedboat)"* tambahnya. Untuk pergi berbelanja menuju Tarakan, warga perlu menghabiskan waktu dan mengeluarkan uang 185 ribu rupiah per-kepala. *"Dari jam 9 pagi jalan, pulang jam 2 siang dia."*

"Kalau listrik, baru-baru ini, tahun 2018 nyala, sekitar bulan 9 lah. Sebelum itu dari genset, jadi beli itu minyak dulu, ada yang voucher, tapi ada yang biasa juga" ujar Siti.

Komoditi yang menjadi andalan Tanah Kuning hingga Kampung Baru adalah semua jenis pangan ikan sampai udang dan teri, merica dan juga kelapa. Komoditi-komoditi ini sesuai dengan kondisi geografis pesisir dan pantai telah menjadi berkah bagi para warga yang merupakan nelayan sekaligus petani ini.

c. Nelayan Yang Dipaksa Berpisah dari Lautan

Namun daya rusak dari kehadiran pembangunan dan perluasan kawasan industri seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning pasti akan 'mendarat' pada ekonomi para nelayan atau ekonomi perikanan tangkap. Berbagai jenis nelayan dan hasil perikanan tangkap dan udang yang akan terdampak dan ekonominya akan hilang. Mereka terdiri dari beberapa jenis nelayan di Tanah Kuning, meskipun tidak semua, namun mayoritas para nelayan di sini berganti jenis alat tangkap dengan mengikuti pergantian musim angin dan gelombang di laut, ataupun pergantian musim ikan saja.

Jenis-jenis nelayan tersebut diantaranya nelayan *ketinting*, nelayan pemancing dan *merawai* juga nelayan *bagan*. Sementara jenis nelayan *bagan*, adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap dengan konstruksi beberapa tiang kayu, berbentuk segi empat, nelayan *bagan* menggunakan jaring dan lampu untuk menarik perhatian ikan lalu menjaringnya.

Produksi nelayan *bagan* berlangsung dari bulan lima sampai bulan sebelas berupa teri. Setelah itu nelayan menggunakan alat tangkap jenis rawai untuk komoditas ikan-ikan karang, bulan 2 masuk musim tangkap udang papai.

"Kalau bagan ini produksi sampai bulan 11 lah, kalau udang papai ini cuma 3 bulan saja yang kencangnya, bulan ini sampai akhir bulan 5, atau bulan 4 lah," ujar Bapak

Gambar 22. Nelayan Ketinting, Mencari Ikan dan Udang di Laut Tanah Kuning



Anti, salah seorang nelayan di Tanah Kuning. Muhamad Nur atau yang biasa disapa Bapak Anti (60 tahun) ini mengaku memiliki 70 kapal jenis ketinting yang biasa ia gunakan untuk mendapatkan udang papai dan ikan-ikan karang.

Dari berbagai cerita para nelayan jika urutan musim ikan dan musim nelayan turun ke laut diletakkan dalam perhitungan kalender masehi, maka dapat disederhanakan melalui tabel kalender berikut:

Tabel 2. Kalender Musim Tangkap Nelayan dan Jenis Komoditi Laut di Tanah Kuning - Mangkupati Sepanjang Tahun, Disarikan dari Wawancara Warga Nelayan Setempat

BULAN	KETINTING	MERAWAI	BAGAN
JANUARI	Udang Besar, Udang Jelangjang, Udang Papai		Lure' (Teri), Teri Hitam
FEBRUARI	Udang Besar, Udang Jelangjang, Udang Papai		
MARET	Udang Besar, Udang Jelangjang, Udang Papai		
APRIL	Udang Besar, Udang Jelangjang, Udang Papai		
MEI			
JUNI		Ikan merah, Ikan kerapu, Ikan besar berat > 1kg	Lure' (Teri), Teri Hitam
JULI		Ikan merah, Ikan kerapu, Ikan besar berat > 1kg	Lure' (Teri), Teri Hitam
AGUSTUS		Ikan merah, Ikan kerapu, Ikan besar berat > 1kg	Lure' (Teri), Teri Hitam
SEPTEMBER			Lure' (Teri), Teri Hitam
OKTOBER			Lure' (Teri), Teri Hitam
NOVEMBER			Lure' (Teri), Teri Hitam
DESEMBER			Lure' (Teri), Teri Hitam



Gambar 23. Ikan Teri



Gambar 24. Perempuan Nelayan di Tanah Kuning Sedang Memisahkan Udang Kecil Dengan Udang Berukuran Sedang

Udang papai adalah salah satu komoditi utama di pesisir dan laut Tanah Kuning. Selain itu ada teri atau dalam sebutan warga setempat *Lure'*, Tanah Kuning juga dikenal dengan komoditi terinya termasuk teri hitam.

"Udang kecil itu Rebon, itu sebutan orang Jawa, Papai kata orang Banjar, Ambaring itu kata orang Bugis, beda-beda namanya," ujar Bapak Anti menjelaskan jenis-jenis komoditi utama para nelayan disana.

"Ada juga teri nasi itu namanya Penja disebutnya, paling kecil, makanya dinamakan teri nasi. Ada juga yang menyebutnya Teri Medan karena dari Medan. Disini juga ada, banyak size-nya kalau teri itu," tambahnya lagi.

Kalender berbentuk tabel musim tangkapan nelayan yang hasilnya *non-stop* dan berbagai jenis hasil tangkapan itu menunjukkan betapa kayanya perairan pesisir dan laut Tanah Kuning hingga Mangkupadi. Sekaligus betapa baiknya hubungan nelayan dengan lautnya, hubungan itu akan putus jika pantai dan laut mereka digusur oleh kawasan industri kelak. Nelayan-nelayan semestinya tidak boleh "diceraikan" dengan lautan. Ekonomi yang akan hilang selain nelayan kecil, adalah termasuk juga para pemodalnya, pengumpul ikan yang dalam hirarki ekonomi nelayan berada diatas. Fungsinya memberi bantuan modal awal, berupa bahan bakar, kreditan alat-alat kapal dan bahkan kapal atau perahu itu sendiri.

Gambar 25. Udang Papai yang Sedang Dijemur di Atas Jaring



Muhammad Nur, adalah nelayan lawas dan kini bertransformasi menjadi pengepul atau pengumpul ikan dan udang. Ia juga ikut memodali lebih dari 70 nelayan ketinting lainnya untuk menangkap udang dan udang papai, ia juga memiliki dan memodali nelayan bagan.

Ia dan jejaring nelayannya juga akan terdampak oleh perluasan kawasan industri dan ekonomi. Ia dan jejaringnya juga akan hilang dan lenyap, meskipun ia punya relasi menyebar yang panjang dan jejaring nelayan yang juga cukup luas.

"Saya langkah awal terbuka udang papai disini masih zaman dorong tangan, 15 tahun lalu. Kalau saya disini istilahnya tinggalnya disini nanti baru 17 rumah saya ada disini, ya, cuma keluar masuk, nanti ada istri baru menetap," ceritanya.

"Kalau saya asal dari pulau laut, Kalimantan Selatan, memang di sini rata-rata dari Kota Baru. Sebetulnya orang Sulawesi semua, bapak saya orang Bantaeng, ibu saya orang Bone. Cuma kelahiran saya Kalimantan sini."

"Kalau bagan ada 18 orang dalam Kelompok Bahtera (Kelompok Nelayan Bapak Anti), punya sendiri 4, lebih duluan udang papai saya daripada bagan. Kira-kira 10 tahunan lah bagan itu", ujarnya.

"Kalau punya saya sendiri ada 4. Cuma yang saya ongkosin ada puluhan orang, itu kan nggak bisa masuk kalau nggak bantu, seperti ini juga. Pembelian ini harus bantu sekian."

Sekitar Tanah Kuning terdapat tiga pengumpul utama ikan nelayan, selain Muhamad Nur yang sempat disinggung di atas, di antaranya yang lain adalah pasangan suami-istri, yakni Erni (42 tahun) dan suaminya, Darman⁵⁶. Bukan cuma ikan, mereka juga pengumpul udang. Mereka menjadi pengumpul ikan dan udang sejak 2012 dengan sekitar 20 nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan bernama Persada Biru.

"Es batu, kita ambil dari luar, semua masuk mobil tutup terpal. Nggak pakai box, habis sampai 700 ribu untuk sekali ambil. Satu mobil bisa 40 kotak. Kalau musim begini, 1 minggu 2 kali ambil. Lebih bagus pakai es balok. Kalau kita dijamin semua nelayannya, jadi nelayan nggak perlu repot urus es lagi."

Erni – 42 tahun, warga Kampung Tanjung

"Kita juga jual beli ikan basah, kayak ikan merah, juga udang, ngambilnya dari nelayan. Kita masing-masing punya anggota, kita yang tanggung minyaknya, umpan termasuk, tapi kapalnya sendiri, kita cuma bantu modal aja," ujar Erni menjelaskan.

Erni juga menjelaskan bagaimana kelonggaran bantuan dan modal pada nelayan anggotanya, termasuk kelonggaran penghitungan dan pemotongan dari seluruh keuntungan.

"Kita bisa sampai 5 kali (turun ke laut) baru dihitung, karena kita yang putar uangnya. waktu hitungannya 20 nota baru dihitung, biasanya sebulan baru dihitung." "Alat kapal juga mereka ambil disini, nanti tinggal dipotong hasilnya, semua ada 20 kapal, di Tanah Kuning sama Mangkupati. Di sini ada berapa kapal aja, cuma pembelian kan lewat 3 orang, jadi masing-masing sama bosnya", tambah lagi.

Tiga orang bos yang dimaksud, adalah tiga pengumpul ikan atau udang lainnya, yakni Haji Asna yang juga memiliki Café Sima di pesisir pantai Tanah Kuning dan Haji Najib.

⁵⁶ Rekaman dan catatan wawancara Erni (pasangan pengumpul ikan/udang setempat dan pemilik toko alat kapal), Tanjung Nelayan di Tanah Kuning, 19 Februari 2023.

Gambar 26. Suasana Perkampungan Nelayan Tanjung, Tanah Kuning



Jika musim ikan dan udang sedang melimpah, bisnis ini juga menggerakkan bisnis pendukung lainnya seperti bisnis es batu balok dari luar Tanah Kuning seperti Tanjung Selor. Mayoritas pengumpul ikan dan udang di Tanah Kuning tidak memproduksi es batu sendiri. Mereka membelinya dari luar, sebagian besar dari Tanjung Selor.

"Es batu, kita ambil dari luar, kita ambil sendiri 26 sampai 30 pakai terpal, semua masuk mobil tutup terpal. Nggak pakai box, habis sampai 700 ribu paling banyak untuk sekali ambil. Satuannya, 17 satu kotaknya. Satu mobil bisa 40 kotak. Kalau musim begini, 1 minggu 2 kali ambil," "lebih bagus pakai es balok, mereka keluar bawa es bungkus. Kalau kita dijamin semua nelayannya, jadi nelayan nggak perlu repot urus es lagi," tutup Erni.

d. Lenyapnya Pekerjaan Perempuan Nelayan

Pekerjaan perempuan nelayan juga salah satu yang akan terdampak. Keterampilan dan pengetahuan membelah, mengolah dan menjual ikan-ikan laut hasil tangkapan sampingan menjadi ikan asin pada perempuan akan hilang. Jika ikan-ikan dan ekonomi perikanan lenyap, termasuk di Kampung Tanjung seperti yang disampaikan

oleh Siti Hawa⁵⁷ di antaranya adalah suaminya, dulunya adalah nelayan yang menangkap udang dan juga ikan. Ia juga membawa hasil tangkapan sampingan seperti ikan gulama. Jenis ikan ini diolah oleh Siti Hawa menjadi ikan asin untuk menambah penghasilan keluarga mereka. Warna ikan gulama putih keabu-abuan sebagian juga memiliki totol hitam, bentuknya lonjong.

"Kalau ikan datang, biasanya kerja ibu-ibu. Mulai siang hari, belah ikan kalau ada yang mau dibelah-belah, baru dijemur bikin ikan asin, dari ikan Gulama, itu ibu belah, terus dijemur," ujar Siti Hawa menjelaskan prosesnya



Gambar 27. Ikan Asin Gulama di Tanah Kuning

"Banyak jenis ikan ke nelayan ini, banyak jenisnya macam-macam. Paling banyak ikan gulama, ikan 'otek, ikan mayung, kalau kakap nggak dibelah, dijual saja. Ikan bawal, ikan ierapu, ikan merah nggak dibelah." "Kalau ada ikan orang beli ya langsung, jadi belah sendiri, jemur, jual sendiri didepan rumah."

Saat dijemur, aroma ikan asin semerbak, bahkan memenuhi kampung sepanjang jalan seperti cerita Wiwi (45 tahun) istri dari Samsu, Ketua RT 12 Kampung Baru dirumahnya.

"Pekerjaan saya belah 'Otek, belah Ikan untuk dijual, 2.000 sekilo-nya. 'Otek dibawa pebagan, kita belah dua karena sangking banyaknya nggak ada harganya Ikan 'Otek itu. Dijemur jam 8-9 sampai jam 2-3 siang dikasih garam dibawa sudah ke Tarakan, baunya ini waktu jemur sepanjang jalan kampung ini loh" ujarinya menceritakan.

Bau ikan asin dan bau ikan teri yang dijemur disepanjang kampung adalah "metabolisme sosial" wilayah Kampung Baru. *"Sekarang ini nggak ada lagi bau ikan asin juga teri, dulu juga kalau kita jalan dari Kampung Baru ke Pindada, hijau*

⁵⁷ Rekaman dan catatan wawancara Siti Hawa, perempuan nelayan di Tanjung, Tanah Kuning, 19 Februari 2023.

**Gambar 28. Ikan yang Siap Dibelah Dijadikan Ikan Asin,
Ditunjukkan oleh Warga di Kampung Tanjung**



pemandangan sekarang sudah digusur semua sama industri, yang kita hirup bukan lagi bau ikan dijemur tapi bau debu kendaraan besar sudah,” tutur Wiwi membandingkan masa-masa di kampungnya sebelum dan sesudah industri datang.

Selain Siti Hawa dan Wiwi ada juga Kesi (32 tahun)⁵⁸, seperti Wiwi dan Siti Hawa suaminya juga nelayan. Ia juga menjelaskan bagaimana cara mengolah ikan asin di kampungnya di RT 12, Kampung Baru-Mangkupadi.

“Biasanya kita pakai ikan ruma-ruma, ikan sembulak, tapi yang sering naik itu ikan selar, ikan selar tahu?. Itu ikan yang punya lajur yang panjang, yang panjang gini kan, lajur itu,” ujar Kesi menjelaskan.

“Jadi ikan asin, prosesnya digarami dulu 1 malam, kalau misalnya ada matahari pagi ya dijemur, kalau tidak ada ya nggak papa sampai 3 hari di situ sambil nunggu mataharinya, kan. Biasa kami beli ikan di Tanjung Batu, ikan talang gitu kan, kami beli sampai 700 kilo kami belah juga selain ikan selar.”

Kini kecemasan juga mendarat di hati Kesi saat ditanya suasana hatinya tentang rencana perluasan kawasan industri di Kampung Baru. Jika tersedia pilihan, mereka

⁵⁸ Rekaman dan catatan wawancara Ibu Kesi, perempuan nelayan di Kampung Baru, Mangkupadi, 20 Februari 2023.

"Suasana hati, ya campur-campurlah, maunya kami nggak usah digusur-gusur, kalau bisa nggak usah, kami mau tinggal di sini saja, sebab kami mau kerja apa kan? kami tahunya kerjanya nelayan saja, baru ini ada rencana pemberitahuan orang nelayan dilarang bangun bagan."

Kesi – 32 tahun, warga Kampung Baru

memilih untuk tidak mau digusur. Kampung Baru direncanakan 100% digusur untuk kawasan Industri ini.

"Suasana hati, ya campur-campurlah, maunya kami nggak usah digusur-gusur kan kalau bisa nggak usah, kami mau tinggal di sini saja, sebab kami mau kerja apa kan? kami tahunya kerjanya nelayan saja, baru ini ada rencana pemberitahuan orang nelayan dilarang bangun Bagan sudah kan."

"Iya dilarang sampai bangun bagan, jadi kami cuma mukat-mukat kepiting, udang-udang gitu kan, ikan, dilarang bangun bagan juga sama pemerintah

kemarin ada rapatnya. Petugas perikanan, tahun lalu, kayaknya 5 bulanan lah sudah. Kami dilarang bangun bagan sudah kebetulan juga kan kita dilarang ambil kayu di hutan sudah kan," ujarnya mengadu. *"Dilarang masuk ke hutan. Kan bagan butuh kayu besar dia untuk bangun bagannya, ambil kayunya sejak itu kadang sampai 3 bulanan. Ini kan musim apa, musim angin utara jadi kebetulan 3 bulan 4 bulan kami ndak nelayan,"* tambah Kesi.

Kesi juga menjelaskan bahwa pekerjaan dan pengetahuan perempuan nelayan diantaranya membuat ikan asin juga bergantung pada kehadiran nelayan dan ikan-ikan itu sendiri, tanpa itu, takkan ada lagi Ikan asin dan pekerjaan mereka.

"Biasa kami cari kayu 4 bulan untuk mempersiapkan bulan 4, ya, bulan 4 itu kayak mulai berdiri sudah kan (bagan), musim teri. Kalau sekarang nggak ada. Dulu di sini pengepul teri dimasak, dikirim ke Malaysia, suami saya yang kerja dulu kan, ikan-ikan asin itu juga kalau nggak ada nelayan dan bagan kan kami sudah tidak belah bikin ikan asin lagi," ujarnya lirih.

e. Perempuan Tidak Diajak Bicara, "Kami Cuma Bisa Bergosip"

Bukan hanya pengetahuan dan pekerjaan perempuan nelayan seperti yang dimiliki dan dipraktikkan oleh Siti Hawa dan Kesi yang akan lenyap. Namun lebih dari itu sejak awal perempuan adalah kelompok yang ditinggalkan atau dilupakan dalam berbagai

Gambar 29. Perempuan Nelayan di Tanjung, Tanah Kuning dan Kampungnya



pengambilan keputusan berkaitan masuknya industri atau urusan jual beli dan pembebasan lahan.

Hal itu terjawab dari pengakuan Arni (35 tahun) di Kampung Baru. Saat pengukuran sudah sepihak mulai dilakukan oleh KIPi pada rumah-rumah warga, pertanyaan diajukan apakah sudah pernah diundang dan diajak bicara atau berunding atau tentang aktivitas pejabat negara seperti presiden yang berencana datang, perempuan tidak pernah dilibatkan.

“Kalau khawatir pasti, pikiran lah itu mikir lagi, contohnya tempat relokasi. Relokasi kemana, nyaman nggak disana gimana nanti, kayak macam kami, saya pribadi direlokasikan nggak ada tanah, enggak mau, kalau misal tempat relokasi cuma 5 kali 10 kayak apa?”

Arni – 35 tahun, warga Kampung Baru

“Enggak pernah diundang. Tapi betulkah isunya Jokowi tanggal 27 mau kesini? Tapi ini betul kayak mau datang di sini begitu juga cuma nggak tahu di Tanjung saja kah? Sampai sini kah? Tapi namanya presiden kan nggak boleh diumumkan kali ya?”, tanyanya. “Perempuan atau ibu-ibu nggak pernah sih diundang, paling ibu-ibu, kami bergosip saja. Kalau masalah proyek nggak pernah. Ada yang bodo amatlah, ngikut yang terjadi-terjadilah gitu. Padahal kita ini punya kekepoan (ke-ingintahuan) yang tinggi juga,” ujar Ibu Arni menutup perbincangan.

f. Mulai Kehilangan Anggota Nelayan

"Pasti ada efeklah, seperti batu bara ini sudah ada dampaknya ke nelayan, penghasilannya kurang. Mungkin karena batu baranya jatuh di laut, jadi kurang ikannya,"

Erni - 42 tahun,
warga Kampung Tanjung

Namun cerita Erni mendadak disergap oleh kecemasan, saat ditanya tentang apa dampak dari berbagai rencana proyek industri di Tanah Kuning dan Kampung Baru yang sekarang sedang ramai, termasuk operasi pertambangan dan pengapalan batu bara disekitar wilayahnya.⁵⁹

"Pasti ada efeklah, seperti batu bara ini sudah ada dampaknya ke nelayan, penghasilannya kurang. Mungkin karena batu baranya jatuh di laut, jadi kurang ikannya," ujar Erni menceritakan.

Erni juga menceritakan bagaimana ia sudah kehilangan 4 orang anggota nelayannya, karena merosotnya pendapatan dari laut.

"Nelayan saya juga berkurang, anggota saya sudah ada yang ke perusahaan. Kemarin sudah ada berhenti satu, baru-baru ini dia jual, 2022 dia jual kapalnya, Pak Aldi namanya. Alasannya sudah nggak bisa melaut. Mungkin karena penghasilan kurang, ikan nggak ada akibat pencemaran."

"Iya berkurang, berkurang 2 anggota. Yang sekarang bawa kapal boat transportasi Sadewa, anggota saya juga untuk berangkat ke Tarakan itu". "Anu.. Namanya Muhammad Nur, duluan dia daripada Aldi berhentinya, tahun 2022 semua, biasanya nambah anggota, sekarang turun jumlahnya". Tahun 2022 saja sudah ada 4 kapal keluar, 2 nya keluar, 2 lagi ke Tarakan".

"Jadi kehilangan 4 anggota, iya 2022 kehilangan 4, tadinya ada 24 orang seluruh anggota disini," ujarnya mengakhiri penjelasan.

Kekhawatiran akan daya rusak aktivitas industri yang akan datang juga muncul dalam raut dan cerita Muhamad Nur, nelayan Tanah Kuning lainnya. Saat ditanya perbandingan 15 tahun lalu ia mencari teri hingga kejadian saat ini. Belum sampai industri besar beroperasi, batu bara bahkan sudah berlangsung mengancam disana.

⁵⁹ Rekaman dan catatan wawancara Erni (pasangan pengumpul ikan/udang setempat dan pemilik toko alat kapal), Tanjung Nelayan di Tanah Kuning, 19 Februari 2023.

Gambar 30. Proyek-Proyek Pembangunan Pelabuhan Kawasan Industri



Sumber Drone JATAM Kaltim 2023.

"Saat ini teri-nya anjlok, Pak, gara-gara batu bara ini. Bongkarnya disini, itu masih ada kapalnya ada di luar sana. Itu yang bikin anjlok. Cuma dia ini saya lihat, langkah awal strategi mereka nelayan dipekerjakan, masih ada nelayan tapi sebagian bukan dipakai. Itu yang jadi masalahnya." "Memang namanya anjlok produksi itu tidak langsung banyak, tapi sedikit-sedikit dampaknya."

g. Bagan Melimpah Teri Tinggal Kenangan

Muhamad Nur membandingkan masa-masa itu dengan masa kejayaan teri yang ia pernah rasakan, ikan teri berlimpah ruah hingga para nelayan bagan sampai harus mengusir agar teri pergi dari bagan mereka, agar jaring tidak keberatan dan tidak membuat runtuh bagan.

"Tahun-tahun jayanya teri dan papai itu diatas tahun, 2015 kayaknya setelah itu anjloknya, semenjak ini (batu bara). Padahal dulu sangking banyaknya pak, ada orangnya ini udah jam 10 pagi, berenang itu, diusir itu teri. Sampai berenang kita ke bagan teri itu nggak mau keluar."

Gambar 31. Bagan di Tanah Kuning (Kiri), Penampakan Lebih Dekat (Kanan)



"Bahkan di Mangkupadi ada, sampai runtuh bagannya gara-gara teri kebanyakan itu dari orangnya, hati-hati, kalau kita kan narik jaringnya sedikit saja, biar terinya hidup di dalam. Sudah itu dilepas aja itu sangking banyak betul terinya, sekarang tinggal kenangan aja," ujarnya sambil tertawa terkekeh.

"Saya masih ini di sini pak, kalau menarik malam main-main saja. udang, se-roll. Sekarang uangnya nggak kembali, gara-garanya batu bara. Cuma lebih banyak keluar pajaknya dia daripada hasil nelayan. Nelayan tidak pernah bayar pajak, itu terusnya pemerintah."

"Mereka buangnya di sungai dekat pangkalan sini. Makanya keluhan tukang tambak, semua mengeluh. Apa sekarang yang bisa bertahan? Sekedar menyambung hidup aja. Setelah diprotes dibendung itu pembuangannya, cuma sempet jebol lagi sekarang makanya diprotes lagi."

Muhammad Nur – warga Tanah Kuning

Selain daya rusak dari aktivitas bongkar muat batu bara di sekitar bagan nelayan, terdapat juga ancaman lain dari aktivitas pembuangan limbah perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang terus berulang, warga pun sempat melakukan demo dan protes awal tahun 2022.

"Mereka buangnya di sungai dekat pangkalan sini. Makanya keluhan tukang tambak, semua mengeluh. Apa sekarang yang bisa bertahan? Sekedar menyambung hidup aja", ujarnya. "Setelah diprotes dibendung itu pembuangannya, cuma sempet jebol lagi sekarang makanya diprotes lagi," tutup Muhamad Nur mengakhiri ceritanya.

h. Gusar Para Pembuat Kapal

Bukan cuma industri es batu balok, eksistensi nelayan dan ekonomi perikanan, Tanah Kuning juga terdapat pembuatan kapal lokal. Jika nelayan dan ekonomi perikanan lenyap, otomatis industri produksi kapal lokal juga terancam. Kegusaran Amiruddin (46 tahun) adalah salah satunya, laki-laki pembuat kapal tradisional ini sudah sekitar 15 tahun menjadi pembuat kapal semenjak merantau dari Sulawesi ke Pagatan, Kalimantan Selatan lalu kemudian sejak 5 tahun belakangan tinggal di Tanah Kuning. Bengkel kerja pembuatan kapal sekaligus rumahnya mudah ditemui di Tanah Kuning, nampak ia sedang mengerjakan beberapa kapal yang ia sebut sebagai penjaring atau penampung ikan berukuran panjang 17 Meter. Keterampilan yang ia peroleh berkat ia belajar selama 10 tahun di Pagatan, Kalimantan Selatan.

"Iya, dulu belajar. Sampai hampir 10 tahun belajarnya, yang di Kalsel itu di Pagatan. Karena pertamanya kan begini dari Pagatan, kalau dulu bagi hasil kami, cuma kadang nggak sama, kadang dia 2 kita 1." "Iya, kalau upahnya sekitar 80-an, satu kapal ya, borongan, itu ada batas waktu sampai 6 bulan bisa lebih cepat. Paling cepat 3 bulan."

"Ini dalam kondisi 50%, ini nanti dipasang mesin juga kapasitas 4 atau 6 silinder, itu kayaknya 35 juta mesinnya saja, bahan beli sendiri, keseluruhan totalnya sejadinya

Gambar 32. Amiruddin (46 Tahun) Salah Satu Pembuat Kapal Tradisional di Tanah Kuning Bersama Kapal Buatannya



lah sekitar 180 nggak sampai 200 juta ya” “Bisa buat angkut penumpang atau barang-barang, sekitar 10 ton keatas. Biasanya orang bawa ikan, bisa sampai 15 ton,” ujarnya menjelaskan.

Bahan baku utama dari kapal-kapal ini adalah kayu keras berjenis meranti dan meranti merah. Sebelumnya saat di Pagatan ia menggunakan jenis kayu keras lain seperti jenis kayu halaban, namun jenis kayu halaban makin sulit dicari di Kalsel karena perambahan hutan oleh pertambangan batu bara. Keadaan dan kesediaan bahan baku kayu pula yang menjadi pertimbangan lain bagi Amiruddin untuk pindah menjadi pembuat kapal di tempat baru di Tanah Kuning.

“Iya, perkiraan saya 3 tahun akan berkurang. Sekarang pun udah berkurang. Sekarang banyak kayu tapi nggak bisa di ambil. Sekitar 30 kilo dari sini kan sudah masuk wilayah industri ini. Sebelum itu saja kan sudah ada kayak batu bara itu kan pencemarannya, di luar itu kan ada bongkar muat batu bara, kelihatan tiangnya di sini.”

Amiruddin – 46 tahun
warga Tanah Kuning

“Jadi batu bara berpengaruh di sana ya karena susah ya, habis sudah lahannya karena diblok, jadi kayu-kayu itu sudah tidak bisa diambil karena sudah dibeli lahannya sama perusahaan. Jadi kita susah caranya beda kalau di sini masih ada lah kayu, kayak kayu meranti merah ini, jadi bergantung sama hutan juga,” tambahnya menjelaskan.

Namun, ia juga memprediksi dalam waktu dekat seiring dengan perluasan kawasan industri, kayu-kayu di Tanah Kuning dan hutan sekitarnya juga sudah mulai susah dicari dan terancam lenyap, juga karena batu bara dan rencana perluasan industri.

“Iya, perkiraan saya 3 tahun akan berkurang. Sekarang pun udah berkurang. Sekarang banyak kayu tapi nggak bisa di ambil. Sekitar 30 kilo dari sini kan sudah masuk wilayah industri ini,” keluhnya. “Sebelum itu saja kan sudah ada kayak batu bara itu kan pencemarannya, di luar itu kan ada bongkar muat batu bara, kelihatan tiangnya di sini,” ujarnya sambil menunjuk.

Hanya ada dua pembuat kapal profesional yang mampu membuat kapal hingga ukuran besar di Tanah Kuning, selain Amiruddin, juga ada Iskandar di Kampung Tanjung yang dikenal dengan julukan sebagai tukang kaca mata, karena orangnya yang mengenakan kaca mata, ia juga berasal dari Kalsel, persisnya ia dari Kota Baru. Kedua pembuat kapal ini memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam

Gambar 33. Bengkel Produksi Kapal Pak Amiruddin



membuat kapal. Membuat kapal adalah profesi yang tidak mudah, butuh *skill* dan pengetahuan khusus diantaranya adalah cara “memulas kayu” atau membengkokkan kayu dan papan untuk dinding kapal.

“Nggak, kalau terlalu bengkok dia dipanasin, ya dibakar. Cuma hawa panasnya aja. Kalo nggak di kasih panas nggak mau dia bengkok, jadi ada teknik memulas kayunya ya,” ujar Amiruddin. *“Kalau ini nggak, kayu besar ini dipahat, yang dibelok-belok itu papannya, ada tempat pembakaran itu di situ, ada kayak begitu kasih api, supaya tidak rusak, baru dipulas,”* jelasnya lagi.

Keterampilan dan pengetahuan khusus Amiruddin dan Iskandar membuat kapal juga terancam akan lenyap bersamaan dengan tersingkirnya hutan tempat tumbuhnya meranti merah yang merupakan bahan dasar kapal. Penandanya adalah harga kayu meranti yang kini makin mahal begitu juga dengan seiring menciutnya jumlah nelayan yang makin sedikit melaut jika laut tercemar industri kelak.

“Iya diatas itu kan, berarti yang kena hutannya ya, meranti itu.” “Sekarang meranti ini satu kubik, kalo disini masih 3 juta 1 kubik, 25 lembar, sudah mulai mahal itu dulu kan 1,5 juta 1 kubik naik 100% ya, dulu saya beli 3 tahun lalu segitu, yang bikin mahal, sudah jauh kan masuk, ongkosnya. Kalau di hutan masih mudah.”

Gambar 34. Suasana Sekitar Bengkel Kapal Tradisional di Tanah Kuning



"Iya karna susah lagi mencari ikan, kalau disini mungkin laut masih bisa kan. Tapi kalau kena juga pabrik susah juga kan nanti nelayan, siapa mau jadi nelayan yang mau pesan kapal lagi kan?" tanya Amiruddin menutup perbincangan dengan gusar.

i. Memasok Hingga ke Tawau dan Tiengkong

Ikan-ikan dari laut kemudian dijual, bukan hanya domestik namun juga ke luar negeri seperti Malaysia. *"Kita ngantar, ada bos di Tarakan kan, nanti diantar ke Tawau (Malaysia), kalau ikan seperti ikan merah dan ikan bawal kita kirim ke Tawau juga,"* ujar Erni menjelaskan.

"Kalau musim begini (musim gelombang utara) sedikit saja, kita nggak pernah kirim banyak karena kurang nelayan (sedikit nelayan berani turun melaut). Kadang habis jual di sini aja kalau lagi gelombang."

"Kalau lagi musim bisa sampai 50 kiloan, kadang nggak sampai, kan nelayan kadang dapat, kadang nggak, tapi dia ada musimnya. Sekarang kan musim udang, nanti musim ikan. Kalau udang lagi musim bisa sampai 100 kilo, tapi hanya musim udang saja, bulan 1 sampai 3 aja. Kalau ikan sampai bulan 5, nanti nyambung ke utara lagi. Cuma ya itu ikannya nggak banyak. Paling banyak 20 kilo."

Gambar 35. Nelayan Menunjukkan Ikan Hasil Tangkapannya di Tanah Kuning.



"Harga udang sekilonya, kami juga jual udang tiger yang kita kirim ke Tarakan. Tapi kalau harga udang biasa paling banyak (paling tinggi) 130 ribu/kilogram, disini 105 ribu/kilogram dari nelayan. Saya jual kesana 140 atau 130 bisa turun lagi sampai 125. Kalau ikan merah 35 ribu perkilo, sampai Tarakan 50 ribu perkilo," ujar Erni lagi.

Bukan hanya ikan yang diekspor, hasil komoditi laut lain seperti teri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dalam negeri seperti Jawa, Mataram, Kupang, Bali hingga Jakarta, pengiriman teri bahkan sampai ke China.

"Dulu pembeli dari Cina itu kami punya perjanjian ada, semua barang Tanah Kuning tidak boleh tolak, makanya kadang dia buang 15 ton, 10 ton, karena kami ada perjanjian sama dia."

Muhammad Nur
- warga Tanah Kuning

"Produksinya 5:1 rata-rata sudah kering, itu 5:1 berarti 5 pikul basahanya. Lebih ngeri lagi kalau naik udang papai, kayak waktu buka dari Cina disini, ya saya timbang 40 ton per-hari, kadang dia beli terus dia buang lagi karena keberatan."

Gambar 36. Udang-Udang Komoditi Ekspor Para Nelayan Tanah Kuning



"Dulu pembeli dari Cina itu kami punya perjanjian ada, semua barang Tanah Kuning tidak boleh tolak, makanya kadang dia buang 15 ton, 10 ton, karena kami ada perjanjian sama dia," Ujar Muhamad Nur.

"Infonya yang dia nggak buka lagi, info itu antara ngirim ke Cina harus barangnya di swab, di vaksin. Ini info saja ya, entah betul atau bagaimana. Karena untuk lokal, untuk lokal nggak mampu dia. Kalau biasa teri paling tidak 5 ton dari kita saja, kalau musimnya, Tanah Kuning ini terkenal terinya"

j. Ekonomi Sarang Walet Terancam Hilang Melayang

Erni menyebut yang memiliki bangunan sarang walet di Tanjung, Tanah Kuning begitu banyak, bahkan yang tidak memiliki justru bisa dihitung jari. Booming membangun sarang walet dimulai sekitar tahun 2014, *"Sebelumnya memang sudah ada tapi rame-ramenya ya diatas tahun 2014 itu,"* ujar Jayusman.⁶⁰

Jayusman adalah salah satu pemilik bangunan sarang walet, ia melanjutkan bisnis sarang walet yang telah dimulai oleh orang tuanya. Awalnya kedua orang tuanya adalah nelayan, sempat menjadi peladang, pernah juga bekerja di perusahaan sawit namun kemudian membangun sarang walet. *"Nah saya lahir waktu orang tua saya masih nelayan pukat dan troll, sekitar tahun 1998-an,"* tuturnya mengingat.

⁶⁰ Rekaman dan catatan wawancara Jayusman (pemilik sarang walet), Tanah Kuning, 17 Februari 2023.

Jayusman mengaku keluarga mereka memiliki 5 bangunan sarang walet, "Cuma yang produktif 2, lokasinya dekat rumah sih, di seberang, masih tanah kuning juga." Bangunan sarang walet keluarganya menghasilkan hingga 3 kilogram, "Harga 9 juta sekarang sekilo, jualnya nanti ada yang datang, penampung gitu, ketetapan harga pasar. Kan awalnya mahal harga sarang burung, dulu bisa sampai 15-an juta sekilo, awal-awal sampai sebelum Covid itu, karena Covid, jalurnya susah, harga turun."

"Tapi masih nutup harga segitu" Masih untung saya. Berapa persennya tidak tau, orang tua yang ngitung itu perkiraan aja ya, sekitar 50%-nya aja lah untungnya," ujanya menjelaskan.

Saat ini pemilik menyebut panennya sudah stabil, seminggu sekali sudah ada hasil namun dikumpulkan hingga genap sebulan setelahnya baru dijual ke pengumpul.

"Untung paling besar pernah dapat 26 juta, paling besar pernah dapat sampe 5 kg sebulan. Tapi itu nggak langsung pure 5 kg dibeli, karna ada sizenya, misalnya yang sudut, pecahan, mangkok, itu size mangkok yang mahal," ujanya lagi.

"Kalau operasional paling hanya biaya listrik aja, kalau bersih-bersihnya didalam bangunan kadang tiga bulan sekali saja," tambahnya.

Jayusman menyampaikan meskipun saat ini belum terpengaruh kehadiran kawasan industri, karena fasilitas industri yang belum terbangun, namun cepat atau lambat daya

Gambar 37. Sarang Walet, Milik Ibu Arni di Kampung Tanjung



"Yang nggak punya bangunan sarang walet disini bisa dihitung jari."

Erni - 42 tahun, pemilik toko kapal dan keluarga pemilik sarang Walet di Kampung Tanjung, Tanah Kuning.

—

"Ngaruh itu (berdampak ke walet), membakar api saja di samping rumah dimarahin, apalagi nanti kalau ada api atau asap cerobong industri."

Jayusman - 24 tahun, pemilik sarang walet, Tanah Kuning.

rusaknya akan mendarat juga pada para pelaku ekonomi bisnis sarang walet ini, *"Ngaruh itu, membakar itu di samping rumah dimarahin bakar sampah, apalagi dari cerobong asap industri. Selain itu walet juga sensitif dengan bau, kita aja gak boleh masuk kalau pake parfum, bagaimana nanti kalau industri beroperasi."*

Muhamad Nur, warga Tanah Kuning lainnya yang juga memiliki bangunan sarang walet ikut menyampaikan keresahannya. *"Saya punya 3 bangunan, cuma kayaknya kena semua dalam wilayah kawasan industri, di Mangkupadi ada, belakang rumah juga ada, di tambak perumnas juga ada."* *"Jadi saya minta dibebaskan, cuma yang diterima itu belum masuk. Karena dia minta 125 juta sedangkan bangunan berapa, tanah 2 hektare jauh sekali,"* keluhnya.

Modal awal membangun bangunan sarang walet memang tidak kecil. Jika berhasil keuntungan juga berlipat ganda seperti yang dirasakan Muhamad Nur maupun Jayusman. Namun, harga kompensasi untuk menggusur bangunan-bangunan sarang walet ini dinilai tidak sebanding dengan nilai dan pendapatan yang mereka hasilkan selama ini.

Mempertahankan bangunan sarang walet juga terasa dalam situasi yang serba salah. Karena walet pantai atau pesisir, mengkonsumsi dan memakan ikan-ikan dan udang berukuran kecil, karena itu jika dampak pencemaran kawasan industri mengalir pada pantai dan air laut maka dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan walet. Rusaknya karang laut dan tercemarnya air laut menghilangkan ikan dan udang, yang juga berkaitan dengan lenyapnya rantai makanan burung walet. Jika industri berdiri, ekonomi sarang walet yang dulunya menggiurkan justru akan terbang hilang melayang.

k. Merica Tinggal Cerita

Merica adalah salah satu komoditi lain di luar komoditi perikanan di sepanjang pesisir khususnya di Mangkupadi. Tidak ada profesi tunggal di sana, seorang petani merica biasanya juga adalah seorang nelayan, kedua profesi ini dilakoni sekaligus oleh warga saat pergantian musim tiba. Jika tidak musim melaut karena angin dan gelombang, mereka mengurus kebun-kebun mericanya.

Di antara cerita di balik merica tersebut adalah cerita pengalaman hidup yang panjang Senong (84 tahun)⁶¹ yang lahir tahun 1939 di Sulawesi lalu merantau ke

⁶¹ Rekaman dan catatan wawancara Pak Senong, petani merica Mangkupadi, 22 Februari 2023.

Pindada tidak jauh dari Mangkupadi. Setelah tahun 1970-an pasca Soeharto terpilih lagi di Pemilu, ia masih mengingat peristiwa itu sebagai patokan perjalanan hidupnya, sebelum menjadi petani merica dan nelayan bagan sepanjang 1982 hingga 2022 ia sudah pernah berprofesi lain seperti bekerja di zaman banjir kap⁶², lalu bekerja di sejumlah pabrik kayu seperti kayu mas ketika era *booming* kayu sedang berjaya tahun 80 sampai 90 an. Ia lalu fokus menanam merica sembari masih menjadi nelayan bagan pada tahun 2014.

Gambar 38. Senong Petani Merica di Mangkupadi



Ia mengisahkan pada tahun 2014, baru ada kurang lebih 14 orang petani merica di Mangkupadi. Ia sendiri hingga terakhir tahun 2021-2022 masih memiliki lahan 2 ½ hektare, karena faktor kesehatan dan usia yang makin tua menginjak 80 tahun, lahan merica tersebut dikelola bersama dengan bantuan keluarganya dan anak-anaknya yang sudah dewasa.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, produksi lada berjalan dengan baik sebelum kawasan industri hadir, ini terbukti melalui sejumlah data statistik mengenai luas areal tanam dan jumlah produksi lada di Tanjung Palas Timur, dimana Desa Mangkupadi pada 2019 memiliki perkebunan merica seluas 59 hektare dengan produksi 3.5 ton yang kemudian naik 500 kilogram pada tahun 2020 yaitu sebesar 4 ton. Pada 2021 luas areal perkebunan lada naik 181 hektare dengan jumlah 240 hektare dengan jumlah produksi sebesar 18 ton.⁶³

Senong menceritakan di atas lahan 2 ½ hektare miliknya tersebut tumbuh 350 pokok tanaman merica. Masa panen setahun satu kali tiap bulan Juli atau Agustus. Ia menghitung terdapat rata-rata 150 kilogram merica tiap panen, dengan harga 53 ribu tiap kilogramnya, ia menerima hasil uang 7,9 juta rupiah tiap panen setelah dijual.

Selain Merica ia juga menanam sayur mayur seperti lombok atau tomat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga. Dengan logika perhitungan itu tiap

⁶² Rekaman dan catatan wawancara Pak Senong, petani merica mangkupadi, 22 Februari 2023.

⁶³ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi lada di desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Bambang, Skripsi, Fakultas Pertanian - Studi Agribisnis, Universitas Borneo Tarakan, 2022.

tahun ia menerima manfaat ekonomi dari mericanya diluar pendapatan dari nelayan, tanah pun masih bisa diwariskan ke generasi keluarga berikutnya, namun logika perhitungan tersebut dibuyarkan oleh logika perhitungan para penggusur lahan dari perusahaan KIPI yang sudah datang membujuk agar Senong melepas lahannya untuk kepentingan perluasan kawasan industri mereka sejak tahun lalu.

Perwakilan KIPI hanya menawar 240 juta rupiah untuk seluruh 2 ½ hektare lahan berisi mericanya yang masih produktif itu. Selain membawa embel-embel Proyek Strategis Nasional (PSN) yang intinya mengatakan kepada warga pemilik lahan untuk tidak bisa lagi menolak karena pengambil-alihan tanah sudah jadi keinginan negara yang tidak bisa lagi dibantah. KIPI juga mengeluarkan surat edaran berisi acuan sendiri untuk tiap harga lahan atau tanah yang dinilai dari posisi lokasinya, berada didalam

Gambar 39. Daftar Harga Tanah Sepihak yang Dibuak oleh KIPI dan KIH

DAFTAR HARGA TANAH DESA MANGKUPADI DAN DESA TANAH KUNING PT KAWASAN INDUSTRI KALIMANTAN INDONESIA (PT KIKI)		
NO	KATEGORI	KISARAN HARGA DAN PENJELASAN
1.	Tanah Kosong/Belukar/Tambak Tidak Aktif	Rp50.000.000 ,- per Ha (untuk Area Pesisir) Rp35.000.000 ,- per Ha (untuk area lain seperti sempadan jalan, sempadan sungai dan <i>enclave</i>)
2.	Tanah dengan Tumbuhan Sawit	
	➤ Sawit Produktif	➤ Rp120.000.000 ,- per Ha
	➤ Sawit Tidak Produktif	➤ Rp75.000.000 ,- per Ha
3.	Tanah dengan Tambak Aktif	Rp100.000.000 ,- per Ha
4.	Tegakan Rumah	Rp1.500.000 ,- sampai dengan Rp2.000.000 ,- per m ² sesuai dengan material bangunan.
5.	Tegakan Sarang Walet (di luar Kampung Baru)	
	➤ Beton	➤ Rp150.000.000 ,-
	➤ Kayu	➤ Rp70.000.000 ,-
	➤ Semi (Campuran Beton dan Kayu)	➤ Rp120.000.000 ,-
6.	Kampung Baru	➤ Relokasi lahan, dibangun rumah, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta infrastruktur dasar. ➤ Bagi warga yang tidak mau direlokasi, akan diberikan kompensasi yang sepadan. Implementasinya akan melibatkan konsultan.

Hak Guna Usaha (HGU) atau tidak dan penilaian posisi lokasi lahan lainnya hingga harga yang mereka tetapkan sendiri tentang komoditi tanam tumbuh, seperti harga tiap pokok pohon sawit, pokok pohon durian termasuk merica.

Untuk merica, KIPI menetapkan hanya 350 ribu untuk ganti kompensasi tanam tumbuh tiap pokok pohonnya, harga ini dikeluhkan oleh Senong. Ia menilai harga tersebut tidak sesuai dengan berapa banyak uang dan tenaga yang sudah ia keluarkan mulai dari merintis lahan, menanam, merawat dengan pupuk dan susah payahnya mengurusnya bertahun-tahun lamanya sejak 2014.

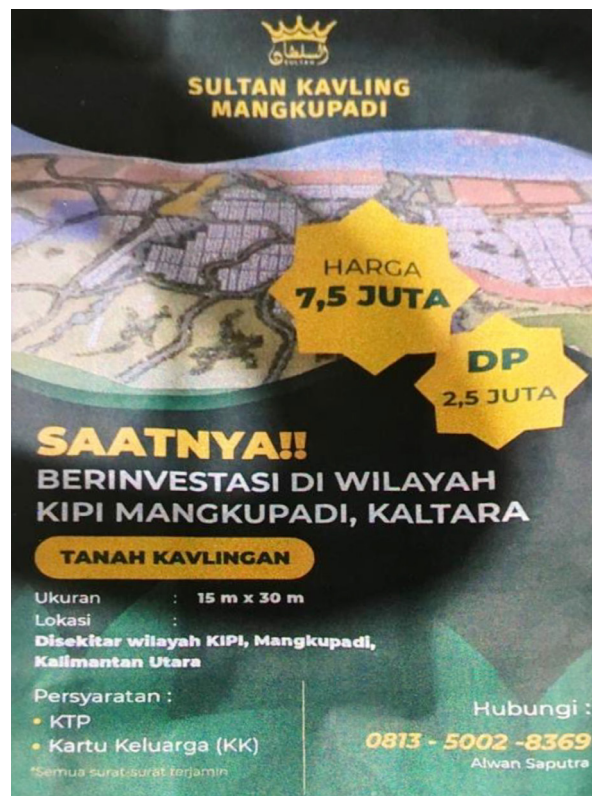
"Saya merintis, membakar lahan, tiap datang membersihkan rumput, memberi pupuk kandang yang harus dibeli, belum lagi ongkos dan biaya saya makan, minum dan bensin naik motor ke kebun bertahun-tahun, itu tidak sesuai pak."

Senong terus melakukan tawar menawar karena pihak KIPI yang selalu mendatangi dan membujuknya menerima uang 240 juta tersebut, ia sempat menawar 300 juta karena sudah kehabisan cara untuk bertahan. Akhirnya seminggu sebelum tim bertemu dengan dia di rumah anaknya di Mangkupadi, pada 14 Februari 2023 ia akhirnya menjual kebun mericanya tersebut. *"Mereka bilang, Pak, masih bisa ditanamin merica dan dipanen, kecuali nanti sampai PSN mau digarap baru betul-betul diambil,"* tambahnya.

"Uangnya sudah saya, DP (downpayment), 10 juta pak ke tanah kaplingan, enggak jauh dari jembatan Mangkupadi Tawar, ada tanah dijual disitu 45 x 50 meter², ada Kaplingan."

Lahannya menunjukkan penyusutan drastis, dari kepemilikan atas tanah kebun merica yang produktif sejak 2014 seluas 2 ½ hektare dikompensasi ganti kerugian sebanyak 300 juta rupiah lalu mengecil dan menyusut menjadi hanya memiliki lahan ganti 45 x 50 meter² dengan harga 280 juta rupiah.

Gambar 40. Pamflet Jual Beli Lahan Kaplingan di Mangkupadi



Ia bersama anaknya lalu memperlihatkan sebuah gambar pamflet jual beli lahan kaplingan, mereka percaya proyek PSN KIPI tidak akan sampai ke lokasi baru tersebut, tapi benarkah begitu? Belum tentu karena, proyek perluasan 380 hektare yang sedang diurus AMDAL-nya justru menyatakan sebaliknya, perluasan mengarah ke Mangkupati, pada dokumen AMDAL pada sekitar Sungai Mangkupati Tawar seperti yang diceritakan Senong justru menjadi lokasi outlet pembuangan limbah cair kawasan Industri KIPI, jika tidak lagi tergusur, belum tentu lokasi barunya lolos dari pencemaran. Lepas dari itu semua jika ia tergusur dan terpaksa pindah, ia pun harus memulai lagi ekonominya dari nol. Nasib Senong tak ubahnya lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya.

I. Lenyapnya Identitas dan Sejarah

"Iya rumah-rumahnya sudah diukur. Terus saya bilang, saya nggak tahu ini. Ini rumah kenang-kenangan satu-satunya, karena mungkin disitu banyak yang ngukur ya, saya bilang, janganlah kasian jual kenangan mamakmu. Semakin banyak semakin banyak orang mengukur. Semakin jadi laporan ke atas bahwa 85% orang Kampung Baru mau digusur, mau dipindah dapat pencairan, kita yang bertahan mau nggak mau di *out* juga."

Arni dan Andi Anti –
warga Kampung Baru

Hal yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dilekatkan dengan kompensasi uang adalah lenyapnya sejarah dan identitas komunitas dan ruang hidupnya, salah satunya yang terangkum dari ingatan Jalaluddin, ia juga menjabat sebagai ketua RT 07 di Kampung Baru. Komunitas warga di Kampung Baru terbentuk dari pertemuan berbagai warga dari berbagai asal usul, namun utamanya dari warga kelahiran Sulawesi yang merantau ke Tawau lalu datang ke Kampung Baru, begitu warga dari Sungai Nyamuk di Nunukan yang juga datang ke Kampung Baru dan sebagian kecil warga yang sudah datang duluan yakni orang-orang Bajau dari Mangkupati, pesisir pantai dan laut yang bersebelahan menyambung dengan Kampung Baru.

Ingatan yang paling membekas oleh Jalaluddin, adalah suka dukanya bersama keluarganya saat pindah dari Tawau lalu ke Kalaputan Besar hingga akhirnya ia mengangkat rumahnya secara manual, diangkat dengan tangan, bergotong

Gambar 41. Perluasan Lahan Proyek Smelter Tsingshan di Karang Tigau, Tak Jauh Dari Kampung Baru



royong pada tahun 2000 setelah datang dari Tawau tahun 1993. Kisah itu sangat berkesan baginya, lenyapnya kampung juga akan menghilangkan ikatan dan sejarah mereka di fase awal memulai kehidupan.

"Waktu itu kita, angkat rumah kayu, pindah rumah beramai-ramaikan, gotong royong, waktu itu masih kurang orang, Pak. Tahun saya pindahkan, waktu itu tahun 2000 saya pindahkan itu (rumah), caranya diangkat, waktu itu masih sekitar 40 orang itu. Datang semua orang itu satu kampung, 40 orang yang ngangkat, orang-orang dewasa, jauh juga, mungkin ada kali 2 kilo (kilometer) lebih."

"Kenapa pindah dari sana kesini? karena di sini, Pak, berkembang orangnya bertambah, di sana enggak, jadi saya kesini dekat orang ramai. Terus juga sejak dari Tawau, saya memang cari lokasi bagan memang."

"Di sana namanya Karang Tigau, Kawaputang Besar, lewat pantai, juga nyebrang sungai situ. Lalu iya, istirahat, satu malam, dia besoknya baru dilanjut lagi bermalam di sebelah sungai. Sungai Kawaputang, Kawaputang Besar, di sana Kawaputang Kecil, waktu itu saya juga sudah berkeluarga, sudah ada anak satu, sekarang sudah 6 anak, seluruhnya yang pindah sekarang jadi warga sini sama-sama saya itu 13 oranglah, tahun 93 sama-sama dari Tawau."

Gambar 42. Makam Keramat Habib Adnan Al Idrus di Desa Mangkupati



Selain itu dikawasan areal rencana kawasan industri juga terdapat sejumlah situs, diantaranya adalah Makam keramat Habib Adnan Al Idrus yang merupakan sosok ulama penyebar dakwah Islam di Tanjung Palas, tiap minggu makam ini diziarahi oleh banyak pengunjung.

m. Pesta Pantai, Mappanretasi Masih Berlanjut?

Ritus yang merupakan bagian dari sejarah dan identitas sosial Tanah Kuning yang juga terancam kehilangan makna adalah pesta laut. Sekretaris panitia acara Hasbullah Rahman atau Boy, menceritakan bagaimana sejak 5 tahun belakangan pesta laut semakin membesar dan mengundang antusiasme berbagai kalangan, bahkan pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk terlibat dan datang. Sebelumnya lima tahun belakangan pesta laut diselenggarakan sederhana saja.

"Dulu hanya sekitar sajen-sajen di warung aja, di pohon kita gantung. Sebenarnya nggak tau persis tahun berapa. Kalau umum baru-baru ini, ada 5 tahun belakangan kali, dulu ada kayak pesta olahraga, tapi nggak luas, ya gitu-gitu saja, iya, yang tahun kemaren baru yang besar itu saya sekretaris. Pak Anti/Muhammad Nur ketuanya."
"Pak Anti itu pengusaha dia, jadi kita anukan dia. Tapi saya yang mengarahkan juga. Tapi katanya bakal masuk ke agenda daerah juga rencananya."

Beberapa kegiatan di dalamnya mulai dari lomba-lomba olahraga yang berkaitan dengan budaya pesisir dan pantai seperti voli pantai, memancing, sisanya adalah ritual dan doa-doa.

"Iya, sama doa-doa gitu. Paman Along yang mimpin ritualnya, dari dulu itu dia selalu. Orang Bugis juga campuran. Puncaknya yang perahu di desain itu, tapi diisi makanan saja itu. Nggak ada unsur-unsur lain, di youtube ada itu? ada, cari aja pesta nelayan Tanah Kuning."

Boy menyampaikan bahwa makna yang ingin diresapi dan pesan yang ingin disampaikan melalui agenda ini adalah menyampaikan rasa syukur atas limpahan rezeki dari tuhan melalui keindahan dan kebaikan alam pesisir, pantai dan laut di Tanah Kuning kepada warga sekitar selama ini.

"Pesan atau maknanya sebenarnya hanya sekedar menyampaikan rasa syukur aja atas hasil yang melimpah di laut. Sebenarnya gini kan biasanya itu bulan 5, itu ambaring naik itu udang papai bulan 2,3,4. Setelah itu biasanya."

Hasbullah Rahman
- warga Tanah Kuning

"Pesan atau maknanya sebenarnya hanya sekedar menyampaikan rasa syukur aja atas hasil yang melimpah di laut. Sebenarnya gini kan biasanya itu bulan 5, itu ambaring naik itu udang papai bulan 2,3,4. Setelah itu biasanya."

"Karena terkenal itu udang, teri, sama ikan seruyuk mirip kayak ikan teri, seruyuk itu di Sungai Kayan itu pak, kalau disini di laut. Kalau Bugis bilanganya ikan lure, iya, awalnya hanya beberapa rumah syukuran itu, lama-lama jadi rame mulai besar gitu."

Warga membiayai kegiatannya melalui iuran dan baru belakangan saja membuat proposal untuk diajukan pada perusahaan dan pejabat pemerintah. Tahun depan ini kita akan lanjut lagi ujarnya, meskipun lanjut masikhkah ritus ini bermakna, jika di depan mata ancaman atas identitas dan ritus pesta laut sudah terpampang nyata, jika laut terganggu oleh industri, apa yang akan disyukuri kelak dari laut saat semua sudah terenggut jika begitu masikhkah pesta laut berlanjut sekaligus bermakna?

n. Ekonomi Wisata dan Kuliner Lokal Tinggal Sejengkal

Dalam rancangan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005-2025, pemerintah daerah Bulungan menyebutkan dua objek wisata alam yang mereka andalkan yakni Pantai Nibung di Pulau Bunyu dan Pantai Tanah Kuning di Tanjung Palas Timur, objek wisata ini bersandar pada kelestarian alam, di laut maupun di darat termasuk flora dan fauna hingga keaslian alamnya. Namun nampaknya dokumen ini bak mimpi di siang bolong yang tak akan mungkin terwujud karena bertolak

belakang dengan dampak yang akan dihadirkan oleh megaproyek kawasan industri hijau yang saat ini juga beriringan berjalan.

Meskipun dalam 3-5 tahun belakangan, banyak penelitian tentang pariwisata di Tanah Kuning menyebutkan banyak potensi dan kemajuan berupa menjamurnya *homestay*, hotel atau penginapan disana, tapi tak satupun penelitian tersebut mempertimbangkan atau menghitung dampak dari hadirnya kawasan industri. Jika pun kawasan industri disebut dalam penelitian tersebut namun dengan pemahaman yang tidak lengkap karena kurangnya pengetahuan akan ancaman dan daya rusak dari operasi berbagai industri ini.⁶⁴

Setidaknya terdapat empat segmen pesisir pantai yang menjadi konsentrasi pariwisata di Tanah Kuning hingga Mangkupati, yakni segmen pantai wisata Tanah Kuning, pantai *family*, pantai kelapa dan pantai cemara di Mangkupati, pada segmen-segmen pantai tersebut terdapat banyak penginapan, *homestay* hingga warung atau rumah makan, seperti Penginapan Muddani, Lima Putra, D'Bilzah *Homestay*, Penginapan Bone dan juga Nero *Homestay* juga masih banyak yang lainnya. Dan biasanya setiap penginapan juga terkoneksi dengan beberapa *café* dan rumah makan/warung disekitarnya. ■

BOX III

KISAH TIGA PEJUANG, WARGA & BURUH MELAWAN KRIMINALISASI

Aris (72 Tahun), Samsu (45 tahun), dan Maslan (26 tahun) sebelumnya hanyalah petani, nelayan dan buruh pekerja biasa, sebelum perusahaan-perusahaan dalam kawasan industri KIH merampas hak dan bahkan mendaratkan intimidasi, teror hingga kriminalisasi terhadap mereka. Aris hanya seorang petani yang melindungi

"Biar siapa yang mau ambil nyawa saya, biar seribu orang sekalipun yang mau, jika Tuhan, Allah SWT tidak mengizinkan maka nyawa saya tidak akan bisa diambil."

Samsu - 45 tahun, Ketua RT 12
Kampung Baru

⁶⁴ Lihat Ayu Astuti, Strategi Pengembangan potensi wisata Pantai, Studi Kasus Desa Tanah Kuning, Tanjong Palas, Bulungan, Universitas Borneo tarakan, 2019 dan Pratiwi Juniar Achmad Ghani, et al..dalam Pengembangan Kawasan Pantai Wisata Tanah Kuning dan Mangkupati di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dimuat dalam Jurnal Arsitektur, Kota dan Pemukiman, Universitas Muslim Indonesia, 2017.

**Gambar 43. Pak Aris (72 Tahun) Ditangkap
Karena Memperjuangkan Tanahnya**



lahannya saat kegiatan PT KIPI masuk menyerobot dengan kendaraan berat dan excavator pada 16 Desember 2022, ia kemudian mempertahankan lahannya dengan berupaya mempertanyakan kejadian tersebut, sebuah video rekaman di *handphone* merekamnya. *"Bapak tidak ada menyampaikan kalimat bernada ancaman, dia hanya mempertanyakan, lihat saja rekamannya ini,"* ujar Imran, anak keempat Aris saat ditemui dirumahnya di Kampung baru pertengahan Februari lalu.

Menurut Imran, pihaknya juga sudah berusaha menyelesaikan dengan mediasi, namun PT KIPI tidak bisa ditemui dan sengaja melaporkan Aris ke Kepolisian. Sehingga proses hukum terus

berjalan, hingga akhir Februari 2023. Aris dituduh melakukan pengancaman dan masih mendekam di Tahanan Lapas Kelas II A Tarakan⁶⁵, tak ada yang membela hak-haknya yang telah dikriminalisasi.

"Kami sedang memikirkan langkah untuk melaporkan balik penyerobotan lahan bapak ini. Sebab kami punya hak atas tanah lahan tersebut, saya kira kenapa PT KIPI memperpanjang melaporkan bapak juga karena kayaknya ingin membuat efek ketakutan kepada masyarakat yang lain."

Banyak kejanggalan yang ditunjukkan Imran pada saat Aris hendak ditangkap, *"Bapak diperlakukan seperti penjahat teroris banyak sekali polisi yang dikerahkan, padahal itu lahan hak dia dan kami kok."*

⁶⁵ <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/28725-pria-72-tahun-ditangkap-tersangka-diduga-lakukan-pengancaman.html>, diakses 29 Maret 2023.

Imran juga menceritakan bagaimana proses penangkapan yang janggal, diantaranya juga adalah tidak sinkronnya tanggal atau waktu dalam surat penangkapan, *"Itupun baru dikeluarkan belakangan, saat ditangkap mereka (polisi) datang tidak menggunakan surat penangkapan, jadi kami tidak mengerti,"* tambah Imran.

Bukan cuma Aris yang berjuang atas haknya yang mengalami ancaman, intimidasi hingga kriminalisasi, situasi ini juga menimpa Samsu. Samsu adalah nelayan yang juga merupakan petani, ia juga menjabat sebagai Ketua RT yang paling tidak disukai oleh pihak perusahaan dan aparat karena menentang rencana relokasi atau penggusuran Kampung Baru untuk kawasan industri. Samsu mengeluarkan semua data dan dokumen tertulis termasuk data di *handphone*-nya saat ditemui di rumahnya di RT 12 Kampung Baru pada pertengahan Februari lalu. Ia dengan bersemangat menunjukkan sejumlah masalah dan kejanggalan yang dilakukan oleh perusahaan dan pengelola kawasan industri.

Diantaranya kecurigaan permainan BCAP dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, ia menyebut bahwa BCAP mengintervensi BPN yang sebelumnya sempat mengeluarkan 5 dari 50 pengurusan surat warga di BPN pada tahun 2015, sebelum tiba-tiba berhenti karena diduga memiliki hubungan kongkalikong dengan BCAP.

"Ini daftarnya, pengurusan surat ke BPN waktu itu, kalau 5 sudah sempat dikeluarkan berarti BPN waktu itu juga tidak tahu atau tidak menganggap bahwa pengurusan surat sertifikat hak atas tanah itu berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) kan?" ujarnya sambil menyodorkan sejumlah dokumen.

Saat ini Samsu mengatakan BCAP sedang mengurus sejumlah blok konsesi HGU-nya untuk dijadikan menjadi Hak Guna Bangunan, sehingga merugikan warga yang diklaim berada di atasnya. Samsu juga menyebut terdapat 31 rumah yang berada di kawasan yang dilabeli dan diklaim oleh BCAP/KIPI sebagai wilayah berstatus HGU BCAP/KIPI. *"Ini akan kena gusur semua rumah-rumah ini, kami mau dibuang kemana?"* tanyanya.

Sikap Samsu yang kritis dan berpihak pada warga membuat warga percaya padanya, ia berupaya berjuang dengan melaporkan ke berbagai pihak untuk meminta bantuan, mulai dari pemerintah hingga ke DPRD. Ia juga jadi tempat

warga menitipkan surat-surat tanah mereka karena tidak ingin melepas tanahnya dengan tawaran harga yang diajukan oleh perusahaan, ia adalah “benteng terakhir” bagi puluhan warga yang memiliki hak kepemilikan tanah seluas kurang lebih 2000 hektare di Kampung Baru.

Samsu bersama sejumlah warga juga menolak untuk diukur tanah-tanahnya, karena menurutnya pengukuran tanah adalah bentuk awal dari perampasan tanah dan permulaan dari penggusuran. Samsu dan warga menolak rencana penggusuran yang dikemas dengan bahasa politik sebagai relokasi. *“Jika mau dipindah, kita di pindah kemana? apakah senilai nanti luas tanah dan posisi lokasi itu dengan Kampung Baru yang sebelumnya kami tempati?”* tanyanya.

Ramainya kabar perlawanan Samsu bersama warga terdengar hingga ke berbagai tempat jauh lainnya, sehingga mengundang simpatik, namun juga beresiko mengundang pihak-pihak yang ingin mengambil untung.

“Saya didatangi banyak orang-orang atau ormas sampai LBH-lah yang mengaku dari Jakarta lah, Bulungan, Tarakan dan lain-lain, Pak, ada juga yang mengaku saudaranya Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan), mereka katanya mau membantu. Tapi banyak juga yang tiba-tiba berubah arah. Banyak yang masuk angin, Pak, makanya saya mau cabut kuasa ini.” Ia mengisahkan perjumpaannya dengan sebuah *law firm* yang telah ia beri surat kuasa, namun ia anggap bertindak di luar yang semestinya.

Samsu mendapatkan intimidasi hingga upaya kriminalisasi. Ia mencatat sudah tiga kali sejak ia bersuara vokal menentang penggusuran kampung baru, upaya-upaya dilancarkan untuk mengkriminalisasinya sepanjang 2021-2023. *“Saya sudah pernah dilaporkan ke Polsek, Pak. Yang kedua kali saya dilaporkan ke Polda, sampe yang terakhir saya dilaporkan ke Polres Bulungan,”* ujarnya menceritakan sambil menunjukkan bukti surat-surat panggilan kepolisian pada dirinya.

*“Jika mau dipindah,
kita di pindah kemana?
apakah senilai nanti luas
tanah dan posisi lokasi itu
dengan Kampung Baru
yang sebelumnya kami
tempati?”*

Samsu – 45 tahun, Ketua RT 12
Kampung Baru

Bukan cuma dengan cara-cara kriminalisasi, cara yang halus dan penuh siasat pun dilakukan untuk melunakan dan menjinakkan perlawanannya, diantaranya adalah bujuk rayu dengan iming-iming gaji dan pembagian fee untuk dirinya sebagai RT, agar mau membantu melancarkan kegiatan perusahaan di Kampung Baru.

"RT-RT disini, Pak ditawari gaji 4 juta tiap bulan, saat itu sedang ramai-ramainya pemasangan plang spanduk Kawasan PSN" ujarnya.

"Saya juga pernah dijanjikan dan dirayu, baru-baru ini pak, datang manajer KIPI, dia mau kasih fee, pernah juga saya diimingin 7 juta, bahkan itu berlaku bagi warga siapa saja yang berhasil membujuk warga lainnya untuk melepas tanah, termasuk juga untuk mempengaruhi warga pada awal-awal pengukuran."

Meskipun dikepung dengan berbagai ancaman, teror hingga siasat licik untuk mencelakainya, Samsu tetap yakin bahwa keselamatannya bergantung pada Tuhan. *"Biar siapa yang mau ambil nyawa saya, biar seribu orang sekalipun yang mau, jika Tuhan, Allah SWT tidak mengizinkan maka nyawa saya tidak akan bisa diambil,"* ujarnya tegas.

Selain Aris dan Samsu, pengalaman lain juga dirasakan oleh Maslan meskipun bukan warga pemrotes. Maslan adalah buruh yang juga berani melawan penindasan salah satu perusahaan dalam megaprojek kawasan industri ini. Maslan sebelumnya bekerja sebagai operator excavator pada salah satu perusahaan atau calon tenant di kawasan industri yang sama, yakni perusahaan yang dikenal di tempat lain sebagai pengelola *smelter*, Tsingshan Group dari

Gambar 44. Salah Satu dari Banyak Surat Pemanggilan Kepolisian untuk Mengkriminalisasi Warga

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN UTARA
RESOR BULUNGAN
"Pro Justitia"

SURAT PANGGILAN
Nomor : SP.G/09/I/2023/Reskrim

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk di dengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) (2) dan Pasal 113 KUHP;
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor LPB/105/XII/2022/SPKT/POLRES BULUNGAN/POLDA KALTARA, tanggal 14 Desember 2022;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/112/XII/2022/Reskrim, tanggal 14 Desember 2022.

MEMANGGIL

Kepada : Nama : SAMSU
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua RT
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Baru Desa Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.

Untuk : Hadir menemui BRIGPOL TEGUH RIFAI di kantor Sat Reskrim Polres Bulungan Jl. Agathis No. 04 Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Pukul 09.00 Wita, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Sebagaimana di maksud rumusan pasal 335 KUHPidana.

Selesai.

Tanjung Selor, 05 Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUNGAN
PS. KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik
MHD. KHOMAINI, S.T.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 92110877

Pada hari ini Kamis tanggal 05 Januari 2023, 1 (satu) lembar Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima : SAMSU

Yang menyerahkan : TEGUH RIFAI
BRIGPOL NRP 92100293

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat di tuntut berdasarkan ketentuan pasal 224 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

No	Tanggal	Hari	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang dipanggil	Penyidik Pembantu

Gambar 45. Satu Diantara Banyak Plang dan Spanduk Larangan Beraktivitas Warga Karena Berada Dalam Wilayah Proyek Strategis Nasional di Desa Mangkupadi



Tiongkok. Maslan sempat bekerja selama 7 bulan sebelum diberhentikan oleh Tsingshan, karena dianggap membangkang perintah perusahaan untuk tidak beribadah sholat Jum'at di Mesjid di luar kawasan kegiatan Tsingshan. Maslan diberhentikan tanpa surat resmi, hanya melalui pemberitahuan di grup *whatsapp*, Maslan tidak sendiri ada 10 rekannya diperlakukan sama. Maslan dan kawan-kawannya dianggap membuang-buang waktu kerja karena setiap sholat Jum'at selalu pergi ke Mesjid.

"Kalau istilah mereka waktu adalah uang, mereka pakai alasan pengurangan karyawan dan karena alat berat rusak," ujar Maslan mengisahkan.

Maslan makin yakin alasan itu hanya dibuat-buat, karena 10 orang yang diberhentikan tanpa prosedur yang layak itu kesemuanya adalah 10 orang yang sama yang selalu pergi sholat ke mesjid di luar, apalagi sebelumnya sejumlah pengawas berkebangsaan Tiongkok sudah pernah marah tentang ini kepadanya.

“Mereka memang menyediakan tempat untuk sholat di lokasi tapi tempatnya sempit sekali dan tidak muat, disiapkan satu tempat container, itu pengap dan sesak.”

Maslan diberhentikan secara tidak layak hanya melalui grup WA karena sedari awal, Tsingshan juga tidak merekrut mereka dan para pekerja melalui sebuah kontrak kerja yang layak pula. Ini menunjukkan Tsingshan diduga sejak awal telah melanggar prosedur rekrutmen kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dampaknya para buruh atau pekerja bisa kapan saja dipecat dan hak-hak normatif ketenagakerjaannya dilabrak begitu saja. *“Kalau gajian kami juga tidak diberi slip gaji, cuma foto bukti via transfer saja,”* ungkap Maslan.

Meski begitu Maslan tidak menyesal, ia menganggap bahwa untuk urusan prinsipil seperti hak untuk beribadah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapa pun termasuk perusahaan seperti Tsingshan. ■

BOX IV

“MEREKA MENGGUSUR KAMI”, BERBAGAI MODUS PERAMPASAN

Dari hasil penelusuran dan perbincangan dengan warga sepanjang Tanah Kuning hingga Kampung Baru, Mangkupadi, ditemukan setidaknya delapan bentuk modus untuk memuluskan perampasan tanah dan ruang hidup warga di tapak. Modus-modus tersebut mulai dari memperlalat pemerintah desa dengan menyelundupkan lampiran berupa surat pernyataan yang harus diisi warga untuk secara sukarela melepaskan tanah atau lahannya. Surat pernyataan siap isi ini diselundupkan dengan dilampirkan pada surat berkop pemerintah desa pada 30 September 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangkupadi, Muhammad Halid.

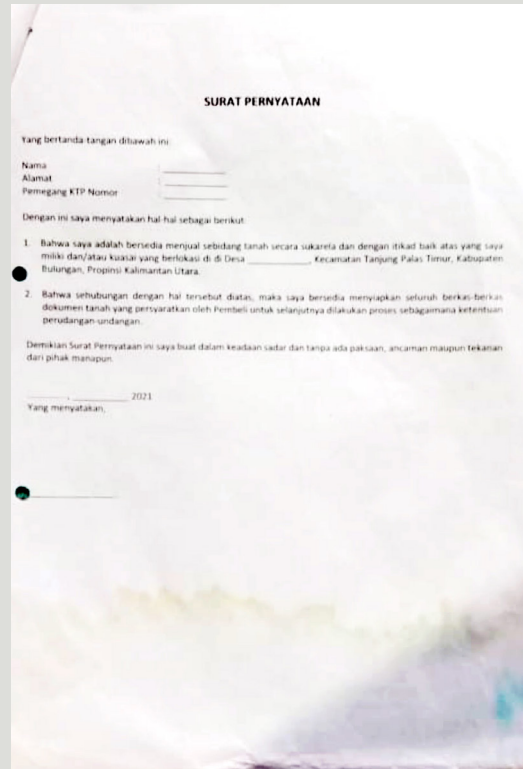
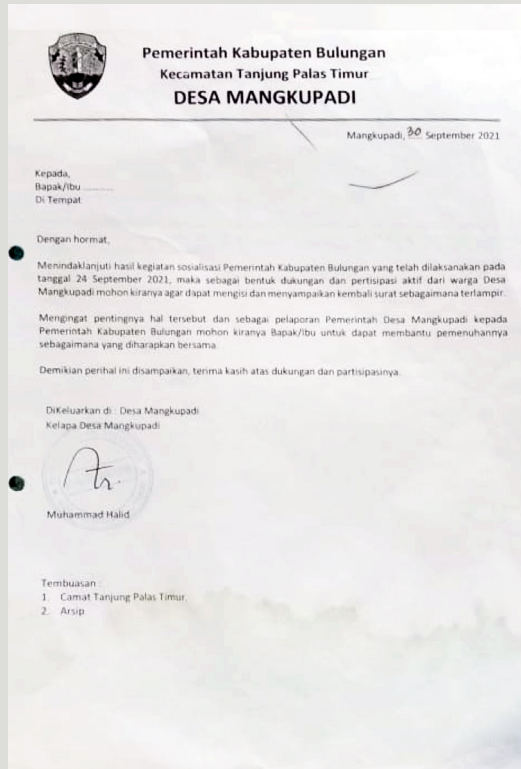
Surat ini jelas melanggar hukum dan menabrak hak-hak masyarakat untuk mengatakan tidak atau hak untuk tidak memberikan persetujuan karena menggiring warga untuk segera mengisinya.

Gambar 46. Delapan Modus Perampasan Tanah di Tanah Kuning Hingga Kampung Baru, Mangkupadi



Modus berikutnya adalah edaran berisi penetapan harga kompensasi dan ganti rugi sepihak atas tanah atau lahan berdasarkan posisi lokasinya dan tanam tumbuh atau material bangunan di atasnya. Tim menemukan foto salinan surat edaran tersebut, yang beredar di tangan para RT dan menyebut Kawasan Industri Kalimantan Indonesia sebagai pihak penerbitnya. Dasar-dasar harga yang dipatok tidak disebutkan berdasarkan pada dasar hukum apa, sehingga penetapan sepihak ini menghilangkan hak warga untuk menentukan sendiri nilai atas lahannya bahkan menghilangkan hak warga untuk menolak jual beli tersebut.

Gambar 47. Surat Sosialisasi Namun Juga Berisi Lampiran Pernyataan Pelepasan Tanah Untuk Warga



Yang *ketiga*, modus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dirubah secara drastik oleh pemerintah daerah, pada 2020 NJOP disekitar lokasi masih 56 ribu rupiah permeter-persegi namun mendadak turun drastis menjadi 6 ribu rupiah permeter-persegi pada 2022⁶⁶.

Keempat, pengukuran rumah & tanah warga dilakukan secara gerilya oleh BCAP/KIPI dengan cara gedor "dari rumah ke rumah". Warga juga dimintai

Gambar 48. Surat Edaran Daftar Harga Tanah Sepihak yang Dirancang oleh PT KIPI/KIKI

NO	KATEGORI	KISARAN HARGA DAN PENJELASAN
1.	Tanah Kosong/Belukar/Tambak Tidak Aktif	Rp50.000.000,- per Ha (untuk Area Pesisir) Rp35.000.000,- per Ha (untuk area lain seperti sempadan jalan, sempadan sungai dan <i>enclave</i>)
2.	Tanah dengan Tumbuhan Sawit	
	➢ Sawit Produktif	➢ Rp120.000.000,- per Ha
	➢ Sawit Tidak Produktif	➢ Rp75.000.000,- per Ha
3.	Tanah dengan Tambak Aktif	Rp100.000.000,- per Ha
4.	Tegakan Rumah	Rp1.500.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- per m ² sesuai dengan material bangunan.
5.	Tegakan Sarang Walet (di luar Kampung Baru)	
	➢ Beton	➢ Rp150.000.000,-
	➢ Kayu	➢ Rp70.000.000,-
	➢ Semi (Campuran Beton dan Kayu)	➢ Rp120.000.000,-
6.	Kampung Baru	➢ Relokasi lahan, dibangun rumah, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta infrastruktur dasar. ➢ Bagi warga yang tidak mau direlokasi, akan diberikan kompensasi yang sepadan.

⁶⁶ <https://korankaltara.com/njop-tanah-di-kawasan-kihi-merosot-drastis>, diakses 19 Maret 2023.

tanda tangan semacam berita acara tapi tanpa penjelasan utuh bahwa pengukuran tidak boleh dianggap otomatis sebagai persetujuan. Hal ini terungkap dari perbincangan dengan Agung dan Sumiyati (Warga Kampung Baru) yang menyebut tidak diberikannya salinan berita acara yang ia telah tanda tangani sehingga rentan dimanipulasi oleh pihak pengukur sebagai bentuk persetujuan, hal ini juga serupa dengan yang diceritakan oleh Samsu (ketua RT 11).

Kelima, manipulasi melalui “Pembengkakan Surat” berupa pembesaran ukuran dan luas tanah warga yang diklaim dibeli oleh pihak BCAP/KIPI. Kasus ini dialami oleh Husria, warga Kampung Baru yang protes jual-beli lahannya seluas 1,5 hektare, namun saat dibuatkan surat jual beli oleh KIPi “dibengkakkan” luasnya menjadi 2 hektare sehingga lahan lain miliknya ikut terjual tanpa sepengetahuan dan tanpa keinginannya.

Keenam, penggusuran tanpa izin atau permissi pada pemilik tanah dan tanam tumbuh diikuti juga dengan kekerasan dan kriminalisasi kepada warga. Aris dikenai pidana pengancaman dengan senjata tajam dan ditahan tanpa bukti yang kuat oleh Polda Kaltara.

Tujuh, merekrut para pelobi dari warga membantu pengukuran, membujuk warga melepas tanah hingga membantu pasang patok PSN. Dengan cara merekrut RT-RT setempat, dapat *fee* pendampingan saat membantu pelepasan tanah. Ditawari gaji 4 juta rupiah per bulan, dapat *fee* pasang plang PSN, tidak hanya di Kampung Baru atau Mangkupadi, begitu juga yang terjadi di Tanah Kuning yang menggunakan istilah “Tim 9” sebagai sebutan terhadap warga yang berprofesi sebagai pembujuk dan pelobi penjualan atau pelepasan tanah-tanah di pesisir Tanah Kuning.

Modus terakhir adalah menggunakan istilah “ganti untung” sebagai istilah yang dipopulerkan untuk membius kesadaran dan secara perlahan membujuk warga melepaskan tanahnya. Menurut Imran, putra dari Aris, warga Kampung Baru, istilah ganti untung dipakai oleh orang-orang di Pertanahan (ATR-BPN), Polres hingga Bupati Bulungan. ■

7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Di balik gemerlap promosi megaprojek kawasan industri terbesar di dunia yang diklaim sebagai kawasan industri hijau, wahana bagi berbagai industri dan manufaktur yang menghasilkan produk dan teknologi untuk menopang ambisi pemerintah Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau dan demi mengejar target transisi energi atas nama perubahan iklim melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air yang juga dilabeli sebagai sumber energi terbarukan di Kalimantan Utara ini, ternyata terdapat pemalsuan dan penggelapan cerita dan duduk perkara.

Pemalsuan dan penggelapan cerita dan duduk perkara tersebut mulai dari ancaman daya rusak, ekonomi menyejarah rakyat yang akan hilang, digantikan paksa oleh operasi kuasa oligarki politik dan bisnis hingga bermacam-rupa modus keji perampasan tanah-laut dan penggusuran ruang hidup yang disembunyikan yang tak diketahui oleh publik luas.

Pengurus negara mengklaim seluruh aktivitas industri dan *tenant* di kawasan ini akan menerapkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi secara drastis jejak karbon melalui penerapan teknologi hijau, produk hijau dengan standar

tertinggi dalam lingkungan hidup bahkan mengklaim dipasok oleh sumber energi terbarukan, oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disebut sejalan dengan target transisi energi dan *net zero emission* untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah Indonesia pada 2060 nanti.

Namun dari penelusuran dalam laporan ini hal yang akan terjadi adalah sebaliknya. Penggelapan dan pemalsuan dari keseluruhan jalan cerita industri ini bahkan terpampang, bukan hanya rakus lahan atau membutuhkan lahan dengan skala besar namun juga rakus air dan rakus energi. Jumlah air yang dipakai dan air limbah yang ditinggalkan amat banyak termasuk mengenai urusan pemenuhan pasokan energi, industri ini akan tetap bersumber dari PLTU batu bara, tidak seperti klaim sebelumnya yang menjual label hijau karena hanya akan menggunakan energi non fosil seperti PLTA.

Komitmen pasca pertemuan G-20 lalu pun terasa hipokrit, karena pemerintah Indonesia yang mendapatkan kucuran dana sekitar 610 juta USD, dari skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan *Energy Transition Mechanism* dari *Asian Development Bank* (ADB) tentang penghentian pembangunan proyek pembangkit batu bara (PLTU) baru akan tetapi disaat yang sama pemerintah Indonesia masih menoleransi dan memberikan pengecualian bagi proyek PLTU batu bara yang ada didalam Kawasan Industri melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 seperti juga rencana pembangunan PLTU untuk kebutuhan jangka pendek di Bulungan dan kawasan industri ini.

Dalam laporan ini terungkap total energi listrik yang akan digunakan adalah 11.404 GWh tiap tahunnya yang kembali bersandar pada batu bara, hanya dari industri petrokimia dan baja jika ditotal terdapat kebutuhan 27.620.000 ton batu bara tiap tahunnya. Jumlah 27,6 juta ton batu bara yang hanya digunakan dikawasan industri ini setara dengan produksi batu bara dari sebanyak 37 IUP batu bara bahkan yang ada di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Utara saat ini.

Sementara untuk pemenuhan air bersih dan air baku, kawasan industri ini akan merampas air dari Sungai Pindada dan Sungai Mangkupadi Tawar yang dikapling berada dalam kawasan mereka hingga Sungai Kayan. Keseluruhan dari data kebutuhan air kawasan industri ini akan menghabiskan 39.450.560 m³ tiap tahunnya, jumlah itu setara dengan pemakaian 1 ½ tahun pemakaian sekitar 700 ribu penduduk Kalimantan Utara.

Bahkan diperkirakan setiap harinya akan terdapat 286.439,86 m³ air limbah yang tetap berujung dibuang tiap empat jam sekali tiap hari ke sejumlah badan air

setempat warga yaitu Sungai Mangkupadi Asin, Sungai Pindada, Mangkupadi Tawar, Kalaputan besar dan Sungai Kampung Baru.

Laporan ini menemukan bagaimana kuasa operasi politik, hukum dan bisnis berlangsung untuk memuluskan megaproyek ambisius ini melalui serangkaian operasi politik dan hukum di daerah untuk mengubah berbagai status kawasan penting melalui rencana ketiga kalinya revisi terhadap tata ruang mulai dari revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur tentang RTRW 2012-2032 yang akhirnya diubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW 2021-2041 dan munculnya kembali rencana revisi ketiga untuk mengakomodir rencana perluasan berikutnya.

Laporan menemukan kawasan perikanan drastis menyusut mengalami penciptaan hingga 5 kali lipat, kawasan wisata pantai yang diantaranya juga berada di Tanjung Palas Timur ikut menyusut 17 kali lipat dari semula, tumpang tindih kawasan budidaya air payau, kawasan pertanian, kawasan peruntukan lahan pangan, pertanian berkelanjutan bahkan hingga kawasan pemukiman pedesaan seperti yang dialami oleh Kampung Baru di Desa Mangkupadi yang sedang menghitung hari untuk digusur paksa.

Terungkap pula delapan modus lainnya dalam memuluskan perampasan tanah dan ruang hidup warga, mulai dari perubahan nilai jual objek pajak secara signifikan dari 50 ribu rupiah menjadi hanya 6 ribu rupiah, berbagai surat edaran penetapan harga bangunan, tanah dan tanam tumbuh sepihak, penciptaan juru lobi di tingkat kampung, pembengkakan luasan dalam proses jual beli tanah hingga kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga pemilik tanah di Kampung Baru, Mangkupadi.

Laporan ini memaparkan ancaman daya rusak melalui pendekatan membaca dan memahami metabolisme sosial dan ekologis, terdapat 12 aspek yang akan hilang dan rusak disepanjang bentang sabuk pesisir Tanah Kuning hingga Kampung Baru, Mangkupadi mulai dari nasib para nelayan yang diceraikan paksa dari lautan. Lenyapnya pekerjaan perempuan nelayan, kisah perempuan yang tidak diajak bicara, kelompok-kelompok nelayan yang mulai kehilangan anggotanya, kesaksian mengenai bagan-bagan yang melimpah ikan teri namun akan tinggal jadi kenangan, kegusaran para pembuat kapal tradisional, keunggulan ekonomi perikanan yang selama ini memasok hingga ke Tawau dan Tiongkok, ekonomi Sarang Walet yang terancam hilang melayang, merica tinggal cerita di Mangkupadi, lenyapnya identitas dan sejarah, kegelisahan yang menyeruak tentang Pesta Pantai, *mappanretasi* yang masihkah bermakna, saat industri hadir nanti, hingga ancaman atas ekonomi wisata dan kuliner lokal yang kini menunggu takdirnya sejengkal lagi.

Celakanya bersamaan dengan operasi penguasaan lahan skala besar, perampasan air, pencemaran air hingga batu bara yang tetap dibakar melalui PLTU Captive di Tanah Kuning-Mangkupadi. Berlangsung pula ancaman pada ruang hidup lain yang ikut dikorbankan untuk pembangunan proyek PLTA Kayan. Proyek bendungan seluas 184. 270 hektare ini menyebut selain untuk melistriki ibu kota baru di Kalimantan Timur juga akan dibangun untuk mensuplai kebutuhan listrik Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning-Mangkupadi di Kalimantan Utara. Proyek ini akan menenggelamkan 6 kampung diantaranya Desa Long Lejuh, Desa Long Peso, Long Bia, Long Peleban, situs purbakala, makam keramat dan kehidupan orang-orang asli masyarakat Dayak di Desa Long Pelban, Muara Pangiang dan Long Lian juga ikut terancam.

Dari seluruh operasi pemicu derita rakyat itu, terdapat sekelompok pelaku politik dan bisnis yang justru mendapatkan untung. Laporan ini menelusuri oligarki politik bisnis dibalik puluhan data dan profil perusahaan yang berada dalam kawasan industri hijau ini, mulai dari pengelola, pemilik *tenant* hingga perusahaan pemasok energi dan bahan bakunya yang diduga memiliki konflik kepentingan.

Sejumlah nama-nama mentereng terungkap seperti Garibaldi Thohir, yang akan menerima manfaat paling besar karena 90 persen dari keseluruhan lahan kawasan industri hijau ini adalah konsesi perkebunan sawit miliknya. Orang dekat Luhut seperti Ir. Justarina Sinta Marisi Naiborhu, lalu munculnya nama lainnya seperti oligarki lokal, Lauw Juanda Lesmana hingga munculnya nama mantan walikota Surakarta/Solo dan sekaligus mantan wakil walikota Joko Widodo sebelum mencalonkan sebagai Presiden pada periode 2010-2012 yakni FX. Hadi Rudyatmo. Ketua DPC Kota Solo dan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini muncul Namanya di dalam dokumen salah satu perusahaan *tenant* di kawasan industri ini.

Termasuk perkongsian PT Kalimantan Alumunium Industry (KAI) yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Indo Alumunium dan PT Cita Mineral Investindo (CMI). Cita Mineral Investindo adalah emiten pertambangan bauksit yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Harita Jayaraya (Harita Group) sebesar 60,64%. Harita Jayaraya adalah perusahaan milik Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, berusia 94 tahun, orang terkaya ke-20 di Indonesia menurut Forbes. Harita Group adalah penyebab utama dibalik daftar derita warga di Pulau Obi, Maluku Utara dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Dua pulau kecil ini tengah diluluh-lantakkan oleh operasi tambang dan pabrik *smelter* nikel mereka.

Melalui kesimpulan, pembingkai masalah dan temuan di atas, maka Tim Penyusun merekomendasikan, sejumlah hal yang dianggap penting dan genting

1. Mensirkulasikan pedoman sederhana, siap pakai menghadapi intimidasi, teror dan kriminalisasi kepada warga pejuang.
2. Membuat belajar bersama *paralegal* dan hak-hak dasar warga dalam menghadapi intimidasi, teror dan kriminalisasi.
3. Mendiskusikan bersama temuan-temuan kunci dan genting dalam laporan riset dan investigasi permulaan ini bersama warga pejuang.
4. Mengkampanyekan penggelapan duduk perkara dan pemalsuan jalan cerita krisis iklim yang justru dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk sekedar menanggung keuntungan, memfasilitasi oligarki politik dan bisnis hingga menyebabkan krisis lebih mendalam dan laju kerusakan lebih meluas melalui megaprojek kawasan industri hijau di Kalimantan Utara ini, yang kesemuanya menyebabkan ancaman dan penderitaan di tingkat tapak proyek ini.
5. Menunjukkan bahwa komitmen pasca G-20 melalui gelontoran dana lebih dari 610 juta USD, dari skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan *Energy Transition Mechanism* dari *Asian Development Bank* (ADB) tentang penghentian pembangunan proyek pembangkit batu bara (PLTU) baru, justru diingkari melalui pembangunan pembangkit berbasis batu bara yang masih terus dilanjutkan di kawasan industri yang disembunyikan dari publik dan dikemas sebagai kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, sebagai **Kebohongan Hijau Berskala Global oleh Pemerintah Indonesia.** ■



SUMBER BAHAN BACAAN DAN PUSTAKA

Artikel dan Berita

1. **setkab.go.id** – Presiden Jokowi *Groundbreaking* Kawasan Industri Hijau di Kaltara, 21 Desember 2021 (diakses pada 29 November 2022), diakses dari <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-groundbreaking-kawasan-industri-hijau-di-kaltara>.
2. **tribunkaltara.com** – Ketua Konsorsium Perusahaan Indonesia dalam KIPI Beber Produk Kawasan Industri Hijau di Kaltara, 21 Desember 2021 (diakses pada 29 November 2022), diakses dari <https://kaltara.tribunnews.com/2021/12/21/ketua-konsorsium-perusahaan-indonesia-dalam-ki-pi-beber-produk-kawasan-industri-hijau-di-kaltara>.
3. **nasional.kontan.co.id** – PLTA Kayan Cascade akan Mulai *Groundbreaking* Bulan Depan, 14 November 2022 (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/plta-kayan-cascade-akan-mulai-groundbreaking-bulan-depan>.
4. **infotambang.id** – Dapat Dana Transisi Energi di KTT G-20 Bali, Indonesia Diminta Prioritaskan EBT, 17 November 2022 (diakses pada 15 Desember 2022) diakses dari <https://infotambang.id/dapat-dana-transisi-energi-di-ktt-g20-bali-indonesia-diminta-prioritaskan-ebt/>.
5. **indonesia.go.id** – PLTA Kayan Mendukung Transisi Energi di Indonesia, 13 November 2022 (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/6463/plta-kayan-mendukung-transisi-energi-di->.
6. **kemenperin.go.id** - Kawasan Industri Tanah Kuning Diusulkan Masuk Proyek Strategis Nasional, 8 Maret 2017 (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/17245/Kawasan-Industri-Tanah-Kuning-Diusulkan-Masuk-Proyek->.
7. **nasional.kontan.co.id** – Lahan Kawasan Industri Hijau Milik Boy Thohir, Luhut; Mungkin Rezeki Beliau, 22 Desember 2021 (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/lahan-kawasan-industri-hijau-kaltara-milik-boy-thohir-luhut-mungkin-rezeki-beliau>.

8. **kaltara.tribunnews.com** – Revisi RTRW Kabupaten, Pemkab Bulungan Sebut Lahan KIPIT Tanah Kuning Mangkupadi Diperluas 380 hektare, 5 Agustus 2022 (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://kaltara.tribunnews.com/2022/08/05/revisi-rtrw-kabupaten-pemkab-bulungan-sebut-lahan-kipi-tanah-kuning-mangkupadi-diperluas-380-ha>.
9. **amp.kaltara.prokal.co** – Pemkab Pesimis Revisi RTRW Selesai Tahun Ini, (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://amp.kaltara.prokal.co/read/news/19272-pemkab-pesimis-revisi-rtrw-selesai-tahun-ini>.
10. **amp.kaltara.prokal.co** – Rp5 M untuk Revisi RTRW Bulungan, (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://amp.kaltara.prokal.co/read/news/15741-rp-5-m-untuk-revisi-rtrw-bulungan>.
11. **radartarakan.jawapos.com** -Revisi RTRW Kota ini Belum Disesuaikan, 18 Februari 2021 (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/18/02/2021/revisi-rtrw-kota-ini-belum-disesuaikan/>.
12. **radartarakan.jawapos.com** – Lahan KIPIT diperluas hingga 30 ribu hektare, 19 November 2022 (diakses pada 29 November 2022) diakses dari <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/19/11/2022/lahan-kihi-diperluas-hingga-30-ribu-hektare/>.
13. **diskominfo.kaltaraprov.go.id** – Produksi Batu Bara Kaltara Capai 21,4 Juta Ton, 14 April 2021, (diakses pada 29 November 2022) Diakses dari <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/produksi-batu-bara-kaltara-capai-214-juta-ton/>.
14. **pu.go.id** – Pemakaian Air Rumah Tangga Perkotaan, 144 liter per hari, 6 Maret 2007 (diakses pada 29 November 2022) Diakses dari <https://pu.go.id/berita/pemakaian-air-rumah-tangga-perkotaan-144-liter-perhari>.
15. **kilasdaerah.kompas.com** – Mengenal Lebih Dekat Perjalanan Kawasan Industri Raksasa di Kaltara, 28 Oktober 2022 (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari <https://kilasdaerah.kompas.com/kalimantanutara/read/2022/10/28/11450601/mengenal-lebih-dekat->.
16. **newsletter.tempo.co** – Duet Maut Proyek Hijau, 23 Januari 2022 (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari <https://newsletter.tempo.co/read/1553090/duet-maut-proyek-hijau>.
17. **katadata.co.id** – Kakek Terkaya di RI Masuk ke Smelter Aluminium Grup Adaro, 23 Desember 2022 (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/63a51e3103f5c/kakek-terkaya-di-ri-masuk-ke-smelter-aluminium-grup-adaro>.
18. **www.gatra.com** – Pejabat dan Pengusaha Berebut Pabrik Pembangkit Listrik di Kalimantan, 28 Maret 2022 (diakses 27 Januari 2023) diakses dari <https://www.gatra.com/news-539496-nasional-pejabat-dan-pengusaha-berebutpabrik-pembangkit-listrik-di-kalimantan.html>.

19. **www.lensaindonesia.com** – Divonis 7 Tahun Direktur PT GEB Tjandra Limanjaya Belum Ditahan, (diakses pada 27 Januari 2023), diakses dari <https://www.lensaindonesia.com/2015/08/25/divonis-7-tahun-direktur-pt-geb-tjandra-limanjaya-belum-ditahan.html>.
20. **www.antaranews.com** – Bangun PLTA Cascade, PT Kayan Hydro Energy KHE Gandeng Sumitomo Corp. Jepang, 6 Oktober 2022 (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3162509/bangun-plta-kayancascade-pt-kayan-hydro-energy-khe-gandeng-sumitomo-corp-jepang>.
21. **www.jawapos.com** – Kayan Hydro Energy Gandeng Sumitomo Corporation Bangun PLTA Kayan, 6 Oktober 2022 (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari <https://www.jawapos.com/energi/01411881/kayan-hydro-energy-gandeng-sumitomo-corporation-bangun-plta-kayan>.
22. **korankaltim.com** – KHE Dianggap Lambat Epsilon Masuk Garap PLTA, 22 Oktober 2022 (diakses pada 27 Januari 2023) Diakses dari <https://korankaltara.com/khe-dianggap-lambat-epsilon-masuk-garap-plta>.
23. **betahita.id** – Dibalik Gelap dan Berlikunya Informasi pencemaran PT KPUC, 8 Desember 2021, (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari - <https://betahita.id/news/detail/6929/di-balik-gelap-dan-berlikunya-informasi-pencemaran-pt>.
24. **tribunnews.com** – Nama Pengusaha Kaya Juanda lesmana Mencuat Dampingi Irianto Lambrie di Pilkada Kalimantan Utara 2020, 8 Desember 2019, (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/08/nama-pengusaha-kaya-juanda-lesmana-mencuat-dampingi-irianto-lambrie-di-pilkada-kalimantan-utara-2020>.
25. **investor.id** – Fortescue Mari Jadikan RI Eksportir Hidrogen Hijau yang Hebat, 14 November 2022 (diakses pada 27 Januari 2023) diakses dari <https://investor.id/business/312821/fortescue-mari-jadikan-ri-eksportir-hidrogen-hijau-yang-hebat>.
26. **arc.or.id** – Diskusi *Metabolic Rift* dan Perubahan Sosio Ekologis di Kawasan Gambut Kalimantan Tengah, 31 Agustus 2020 (diakses pada 23 Maret 2023) diakses dari <https://arc.or.id/ringkasan-diskusi-metabolic-rift-dan-perubahan-sosio-ekologis-di-kawasan-gambut-kalimantan-tengah/>.
27. **rakyatkaltara.prokal.co** - Pria 72 Tahun Ditangkap, Tersangka Diduga Lakukan Pengancaman, 28 Februari 2023 (diakses pada 29 Maret 2023, diakses dari <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/28725-pria-72-tahun-ditangkap-tersangka-diduga-lakukan-%20pengancaman.html>.
28. **korankaltara.com** – Bupati Ingin Dibangun BLK di Bulungan, 15 September 2022 (diakses pada 20 Maret 2023) diakses dari <https://korankaltara.com/bupati-ingin-dibangun-blk-di-bulungan>.

29. **korankaltara.com** – NJOP Tanah di Kawasan KIH Merosot Drastis, 19 Oktober 2022 (diakses pada 19 Maret 2023) diakses dari <https://korankaltara.com/njop-tanah-di-kawasan-kihi-merosot-drastis>.
30. **benuanta.co.id** – KIH Tanah Kuning Mangkupadi Dinilai Bisa Tingkatkan PAD, 25 Februari 2022 (diakses pada 20 Maret 2023) diakses dari <https://benuanta.co.id/index.php/2022/02/25/kihi-tanah-kuning-mangkupadi-dinilai-bisa-tingkatkan-pad/69893/17/08/43/>.

Situs dan Website

1. **Kementerian Investasi/BKPM** – Potensi Investasi Regional, Kawasan Ekonomi, Industri Hilirisasi *Crude Palm Oil*, Kabupaten Bulungan, 11 Oktober 2022 (diakses pada 15 Desember 2022) dari <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/pejuang-investasi/detail/?id=949>.
2. **Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China** - *Joint Statement between The People's Republic of China and The Republic of Indonesia*, 16 November 2022 (diakses pada 15 Desember 2022) diakses dari https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202211/t20221117_10976784.html.
3. Informasi Situs <https://www.ptkhn.com/id/>.

Peraturan dan Regulasi

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
2. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Mengenai Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Perairan Tanah Kuning – Mangkupadi Kabupaten Bulungan, 2019.
3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041.
4. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 2012-2032.
5. Badan Pusat Statistik (BPS), Bulungan Dalam Angka, 2022.

Laporan, Jurnal dan Penelitian

1. **jatam.org** - Lembar Fakta untuk *Conference of The Parties (COP) Ke 27*, Bagaimana Megaproyek Ibukota Baru Indonesia Mengundang Bencana Iklim dan Menghancurkan Masyarakat dan Perempuan Adat Suku Balik di Kalimantan Timur, 2022 diakses dari <https://www.jatam.org/megaproyek-ibukota-baru-bencana-iklim-dan-masyarakat-adat/>.
2. **Bambang, 2022**, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Lada di Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Skripsi, Fakultas Pertanian - Studi Agribisnis, Universitas Borneo Tarakan.
3. **Ayu Astuti, 2019**, Strategi Pengembangan Potensi Wisata Pantai, Studi Kasus Desa Tanah Kuning, Tanjong Palas, Bulungan, Skripsi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan.
4. **Pratiwi Juniar Achmad Ghani, et al., 2017**, Pengembangan Kawasan Pantai Wisata Tanah Kuning dan Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dimuat dalam Jurnal Arsitektur, Kota dan Pemukiman, Universitas Muslim Indonesia.
5. **Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M.Sc, et al., 2019**, Studi Biodiversitas Perairan Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dipublikasikan oleh WWF Indonesia dan Universitas Kaltara.
6. **Prof. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah, M.Sc., 2020**, *Study on the Ecological Status of Kayan Rivers Based on the Biodiversity of Waters and the Hydrology Conditions*, Dipublikasikan oleh WWF Indonesia, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Kaltara.
7. **Yayasan Pionir bersama WWF Indonesia, 2022**, Kertas Posisi Evaluasi 10 Tahun Pembangunan PLTA Kayan, Strategi Menuju EBT.

Dokumen Lain

1. Dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pengembangan Kawasan Industri Tanah Kuning, 2022.
2. Dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), 2023 Sebanyak 17 Profil Perusahaan beserta daftar pengurus dan pemegang saham dalam, dan yang terkait dengan proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI-KIPI) di Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara, diakses dari *database JATAM Kaltim*.

TENTANG PENYUSUN

NUGAL Institute for Social and Ecological Studies adalah organisasi yang bercita-cita menanam benih pengetahuan baru dan ingin mendekolonisasi pengetahuan tentang masyarakat, ilmu-ilmu sosial dan lingkungan hidup untuk membangun pengetahuan sosial dan ekologi tandingan yang bersungguh-sungguh berangkat dari paradigma dan perspektif masyarakat akar rumput demi keselamatan saat ini dan masa depan.

NUGAL percaya selama praktik dan nilai-nilai dalam “menugal” sebagai sebuah bagian dari metabolisme sosial ekologis dalam kehidupan berladang masyarakat akar rumput terus bertahan maka asa untuk melakukan pembalikan krisis yang diciptakan oleh kapitalisme ekstraktif masih hadir mungkin dilakukan.

Untuk menjangkau NUGAL silahkan hubungi kami lewat e-mail: nugalinstitute@gmail.com.

Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) adalah bagian dari jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.

JATAM Kalimantan Timur bekerja dengan masyarakat korban yang dirusak oleh ekstraktivisme. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masif lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Untuk menjangkau JATAM Kaltim silahkan akses Instagram [@jatamkaltim](https://www.instagram.com/jatamkaltim).

Laporan Penelitian Lapangan

KEBOHONGAN HIJAU:

Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki
dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak
Proyek Kawasan Industri Hijau
di Kalimantan Utara

Dipublikasikan bersama oleh:

NUGAL Institute

for Social and Ecological Studies dan

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Kalimantan Timur



Nugal Institute
for Social and Ecological Studies



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
Kalimantan Timur

SEPTEMBER 2023